Analisis Faktor-Faktor Determinan E-Partisipasi di Negara Eropa dan Oseania

SKRIPSI

Oleh:

Nama: Nadifa Maharani Safitri

No Mahasiswa: 21312234

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

Analisis Faktor-Faktor Determinan E-Partisipasi di Negara Eropa dan Oseania

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika, UII

Oleh:

Nama: Nadifa Maharani Safitri
No Mahasiswa: 21312234

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 8 Januari 2025
Penulis,



(Nadifa Maharani Safitri)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Faktor-Faktor Determinan E-Partisipasi di Negara Eropa dan Oseania

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Nadifa Maharani Safitri

No Mahasiswa: 21312234

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Pada
Tanggal 14 Februari 2025
Dosen Pembimbing,



(Arief Rahman S.E., M.COM., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Faktor-Faktor Determinan E-Partisipasi di Negara Eropa dan Oseania

Disusun oleh : NADIFA MAHARANI SAFITRI

Nomor Mahasiswa : 21312234

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 04 Maret 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D

Penguji : Maulidyati Aisyah, SE., M.Com(Adv)., CMA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

MOTTO

“Setiap tetes keringat orang tuaku adalah ribuan langkahku untuk terus maju”

-Nadifa Maharani Safitri-

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir Skripsi penulis yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Determinan E-Partisipasi di Negara Eropa dan Oseania." Dapat terselesaikan dengan baik. Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini tidak lepas dari bantuan orang lain. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS., yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Arief Rahman S.E., M.Com., Ph.D., yang berperan sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang luar biasa dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Ayah dan Ibu saya. Bapak Syamsu Anwar dan Ibu Sariati tercinta. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dan doa yang tidak pernah putus untuk saya sehingga menjadi motivasi dan semangat untuk saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara-saudara penulis, kakak saya Isra Noviarni, adik saya Hanif Darussalam terimakasih selalu ada disaat suka dan duka yang penulis alami selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada abang saya Khairunnas yang memberikan semangat, dukungan, uang buat bantu dari pertama kuliah sampai menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman penulis yang telah berjuang bersama: Ghina, Lestin, Lisa, Firda, Afifah, Natasya, Khansa, Zahra, dan Freya. Dukungan dan semangat kalian dalam menyelesaikan tugas akhir ini sangat berarti bagi saya, dan saya menghargai setiap motivasi yang kalian berikan.
6. Untuk teman-teman penulis diperantauan yang sama-sama tinggal di kos Citra Kusuma, Teh dila, Peggi, Kak Sheila, Mba Ais, Mba Ada, Mba Icha, Mba Shofura, Mba Rade yang menjadi rumah kedua saya dirantau dan selalu menghibur saya disaat suka maupun duka.
7. Untuk seorang mentor dalam komunitas sahabat belajar seperjalanan, Kak Riri yang selalu menyempatkan diri untuk mendengarkan keluh kesah penulis, baik saat bahagia maupun sedih selama proses perkuliahan yang penulis jalani, kakak yang selalu mengingatkan kebaikan kepada penulis dan senantiasa berada dijalan Nya.

Ucapan terimakasih juga kepada sahabat penulis dari SMA, Nurfalia susanti, Desi Amelia Putri yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.

8. Untuk rekan-rekan Takmir Al-Muqtashidin baik akhwat maupun ikhwan periode 2021-2025 yang namanya tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu karena cukup banyak, terima kasih atas ilmu dan lingkaran kebaikan yang penulis dapatkan sehingga memotivasi penulis untuk terus belajar menjadi lebih baik.
9. Untuk teman-teman tim susu asik, Ibu Sarah, Bapak Ihsan, Qori, Hera, dan mba Feni yang menjadi teman penulis ditempat kerja yang memberikan dukungan dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi walaupun sambil bekerja.
10. Terakhir kepada seseorang yang tidak dapat penulis sebut namanya, yang memberikan semangat dan berjanji akan menemani proses penulisan skripsi penulis, walau nyatanya ia tidak bisa menepati janjinya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penulisan skripsi ini. Pengalaman ini mengajarkan penulis banyak hal, termasuk keikhlasan, kesabaran, dan menerima arti kehilangan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna karena pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ganjaran pahala yang berlimpah atas ketulusan serta kebaikan semua orang yang terlibat dalam membantu penulis. Diharapkan tulisan ini bisa memberikan dampak yang baik bagi semua yang membacanya.

Penulis mengakui adanya keterbatasan dan kekeliruan dalam penelitian ini. Maka dari itu penulis sangat menghargai masukan, saran, dan pendapat dari semua pihak untuk memperbaiki penelitian ini. Penulis juga mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua yang membutuhkan dan tertarik dengan penelitian ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 8 Januari 2025

(Nadifa Maharani Safitri)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 10
1.4 Manfaat Penelitian 10
1.4.1 Manfaat Teoritis 10
1.4.2 Manfaat Praktis 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA 12
2.1 Teori Keagenan 12
2.1.1 Definisi dan Konsep E-Partisipasi 13
2.1.2 Komponen E-Partisipasi 15
2.1.3 Bentuk Layanan E-Partisipasi 18
2.2 Faktor yang Memengaruhi E-Partisipasi 20
2.2.1 Pengendalian Korupsi 20
2.2.2 Hukum dan Peraturan 23
2.2.3 Efektivitas Pemerintah 26
2.2.4 Suara dan Akuntabilitas 27
2.2.5 Modal Manusia 29
2.2.6 Infrastruktur Telekomunikasi 30
2.3 E-Partisipasi di Negara Eropa dan Oseania 32
2.3.1 Penggunaan E-Partisipasi di Negara Eropa 32
2.3.2 Penggunaan E-Partisipasi di Negara Oseania 34
2.4 Penelitian Terdahulu 36
2.5 Kerangka Pemikiran 42
2.6 Hipotesis Penelitian 44
2.6.1 Pengaruh Pengendalian Korupsi terhadap E-Partisipasi 45
2.6.2 Pengaruh Hukum dan Peraturan terhadap E-Partisipasi 47
2.6.3 Pengaruh Efektivitas Pemerintah terhadap E-Partisipasi 49
2.6.4 Pengaruh Suara dan Akuntabilitas terhadap E-Partisipasi 50
2.6.5 Pengaruh Modal Manusia terhadap E-Partisipasi 52
2.6.6 Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi terhadap E-Partisipasi 53
BAB III METODE PENELITIAN 57
3.1 Populasi dan Sampel 57
3.2 Data dan Sumber Data 59
3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 60
3.3.1 Variabel Independen 60
3.3.2 Variabel Dependen 62
3.4 Teknik Analisis Data 65
3.4.1 Metode Common Effect 67
3.4.2 Metode Fixed Effect 67
3.4.3 Metode Random Effect 68
3.5 Proses Pemilihan Model dalam Data Panel 68

3.4.4 Uji Chow ((Uji Common atau Fixed Effect) 69
3.5.1 Uji Hausman (Uji Fixed Effect atau Random Effect) 69
3.5.2 Uji Breusch Pagan 70
3.5.3 Uji Asumsi Klasik Data Panel 71
3.4.4 Uji Statistik Analisis Regresi 73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 76
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian 76
4.2 Hasil Regresi Data Panel 80
4.3 Pengujian Hipotesis 83
4.3.1 Uji t (Uji Signifikansi) 83
4.3.2 Uji F (Kelayakan Model) 85
4.3.3 Koefisien Determinasi (R-squared) 85
4.4 Pembahasan 86
4.4.1 Analisis Pengaruh Pengendalian Korupsi terhadap E-Partisipasi 86
4.4.2 Analisis pengaruh Hukum dan Peraturan terhadap E-Partisipasi 88
4.4.3 Analisis Pengaruh Efektivitas Pemerintah terhadap E-Partisipasi 90
4.4.4 Analisis Pengaruh Suara dan Akuntabilitas terhadap E-Partisipasi 91
4.4.5 Analisis Pengaruh Modal Manusia terhadap E-Partisipasi 93
4.4.6 Analisis Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi terhadap E-Partisipasi 94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 96
5.1 Kesimpulan 96
5.2 Saran 98
5.3 Implikasi 98
Daftar Pustaka 100
Lampiran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	56
Gambar 3.1	Analisis Data	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1	Daftar Sampel Negara	58
Tabel 3.2	Pengukuran Variabel	63
Tabel 4.1	Hasil Statistik Deskriptif	76
Tabel 4.2	Hasil Regresi Common Effect Model (CEM)	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:	Daftar Negara di Eropa dan Oseania	107
Lampiran 2:	Index Variabel PK, HP, EP, SA, MM, IT, EPT	108
Lampiran 3:	Hasil Regresi Data Panel dengan Metode Common Effect Model (CEM)	117
Lampiran 4:	Hasil Uji Chow	117
Lampiran 5:	Hasil Uji LM	118
Lampiran 6:	Data Analisis Deskriptif	118

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of various factors on e-participation in 57 countries listed in the UN Government Survey and Worldwide Governance Indicator (WGI) for the years 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, and 2020, located in Europe and Oceania. The background of this research is based on the importance of e-participation in enhancing public involvement in the governance process. The research method used is regression analysis to test the influence of independent variables, namely control of corruption, rule of law, government effectiveness, voice and accountability, human capital, and telecommunication infrastructure on e-participation. The results of the study indicate that collectively, all independent variables have a significant effect on e-participation. However, partially, only government effectiveness has a significant influence on e-participation, while the variables of control of corruption, rule of law, voice and accountability, human capital, and telecommunication infrastructure do not show significant effects. The conclusion of this study emphasizes that to enhance e-participation, the primary focus should be on improving government effectiveness in the countries of Europe and Oceania.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai faktor terhadap e-partisipasi di 57 negara yang tercantum dalam Survei Pemerintah PBB dan Indikator Tata Kelola Dunia (WGI) untuk tahun 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, dan 2020, yang berlokasi di Eropa dan Oseania. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya e-partisipasi dalam meningkatkan keterlibatan publik dalam proses tata kelola. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu pengendalian korupsi, supremasi hukum, efektivitas pemerintahan, suara dan akuntabilitas, modal manusia, dan infrastruktur telekomunikasi terhadap e-partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kolektif, semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap e-partisipasi. Namun, secara parsial, hanya efektivitas pemerintahan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap e-partisipasi, sedangkan variabel pengendalian korupsi, hukum dan peraturan, suara dan akuntabilitas, modal manusia, dan infrastruktur telekomunikasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa untuk meningkatkan e-partisipasi, fokus utama harus pada peningkatan efektivitas pemerintah di negara-negara Eropa dan Oseania.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini telah banyak membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi (Astria, 2019). Kehidupan sehari-hari sekarang melibatkan internet, *smartphone*, dan media sosial yang memungkinkan orang terhubung dengan orang di seluruh dunia dalam hitungan detik. Selain itu, berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, telah direvolusi oleh teknologi. Akibatnya, layanan yang diberikan kepada orang-orang lebih efektif dan efisien.

Namun, dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, terdapat dampak yang perlu diperhatikan. Salah satunya kesenjangan digital, dimana tidak semua orang atau kelompok memiliki akses ke teknologi yang sama sehingga hal ini memiliki potensi untuk memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, terutama di negara-negara berkembang (Sarjito, 2023). Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat berdampak negatif pada kesehatan mental seseorang dan mengurangi interaksi sosial tatap muka.

Dampak lain dari perkembangan teknologi adalah perubahan dalam cara mengakses informasi. Dengan adanya internet, informasi sekarang dapat diakses dengan mudah dan cepat, tetapi hal ini juga menjadi tantangan baru seperti

penyebaran berita palsu dan informasi yang menyesatkan (Fitriani dkk., 2023). Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan dalam literasi digital menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk dapat memilih informasi yang akurat dan relevan.

Selain dampak yang disebutkan sebelumnya, kemajuan teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi publik. Adanya *platform* digital memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Media sosial, forum *online* dan aplikasi telepon memungkinkan orang berbagi pendapat, berbagi informasi, dan bekerja sama dalam inisiatif publik dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin (Mokobombang dkk., 2023). Misalnya kampanye *online* yang memiliki kemampuan dengan cepat mengumpulkan dukungan untuk masalah tertentu, memobilisasi massa, dan meningkatkan kesadaran sosial dan politik.

Meningkatnya kompleksitas masalah sosial, politik, dan tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas publik telah memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan penyampaian layanan publik mereka, khususnya melalui inisiatif e-*government*. Penggunaan TIK di sektor publik juga diharapkan dapat membangun mekanisme yang lebih efektif untuk keterlibatan warga negara, yang dikenal sebagai e-partisipasi (Komito & Komito, 2016) . Istilah ini merujuk pada proses melibatkan warga negara melalui TIK dalam pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, serta desain dan penyediaan layanan untuk menjadikan proses ini partisipatif, inklusif, dan deliberative Karena dapat mendekatkan pemerintah dengan warga negaranya, para akademisi dan manajer publik memandang e-partisipasi sebagai

sebuah bentuk inovatif tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif, membantu mengatasi keterbatasan mekanisme konvensional untuk melibatkan warga negara (Kardan dan Sadeghiani, 2011).

Konsep pemerintahan digital, atau arah tata kelola, telah mengalami evolusi sejak pertama kali diperkenalkan. Awalnya, konsep ini lebih menekankan pada regulasi dan pengawasan, namun kini beralih fokus kepada transaksi, layanan, interaksi, dan kepuasan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan (Lee dkk., 2018). Inovasi digital berperan sebagai elemen utama yang dapat meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan pemerintahan saat ini.

Keberadaan teknologi informasi yang memungkinkan partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam transformasi digital. Salah satu contohnya di Amerika Serikat adalah program *e-rulemaking*, yang menunjukkan bagaimana teknologi dapat berfungsi untuk mengumpulkan opini publik dengan lebih efisien, dengan cara ini pemerintah dapat menciptakan peluang yang lebih besar untuk memastikan keterbukaan, tanggung jawab, dan proses pengambilan keputusan yang adil (Sivarajah dkk., 2016).

Evolusi teknologi digital saat ini telah menciptakan banyak perubahan yang menyediakan lebih banyak media untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam dinamika politik dan pengambilan keputusan (Suherlan, 2023). Perubahan ini telah menciptakan peluang baru untuk memperkuat partisipasi publik di setiap tahap proses demokrasi (Congge dkk., 2023). E-partisipasi adalah konsep yang

mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk berkontribusi dalam kebijakan publik sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan keinginan dan masukan mereka, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Selain itu, e-partisipasi juga memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan publik untuk meningkatkan interaksi antara warga negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Demirhan dan Oktem (2011) menyatakan bahwasanya partisipasi politik warga negara merupakan elemen kritis yang memengaruhi keputusan politik dan kebijakan publik (Verba dkk., 1995). Selain itu, komunitas sipil dapat dianggap memiliki peran dalam mendorong warga untuk berpartisipasi dalam mekanisme pengambilan keputusan (Lombardi dkk., 2010). Dengan adanya hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintahan dan penyusunan kebijakan, partisipasi publik telah diatur oleh undang-undang. Ini menunjukkan bahwa partisipasi publik bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan elemen vital yang berdampak pada masa depan masyarakat..

Negara-negara maju telah berhasil menerapkan e-partisipasi. Namun, di negara berkembang, pelaksanaannya masih terhambat oleh kurangnya infrastruktur yang memadai (Samsor, 2021). Negara dengan infrastruktur yang lemah sering kali memiliki fasilitas yang terbatas, seperti dalam sektor transportasi, komunikasi, dan penyediaan listrik. Meskipun pemerintah di negara berkembang memiliki kesempatan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK),

mereka dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan dalam mengimplementasikan e-partisipasi. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga meliputi struktur organisasi, keterampilan, kepemimpinan, sumber daya manusia, dan penerapan supremasi hukum.

Good Governance memiliki peluang yang signifikan dalam merevolusi administrasi publik, memperbaiki penyampaian layanan publik melalui kerjasama antar berbagai aktor, mengatasi tantangan perkembangan yang semakin sistematis, dan meningkatkan kesejahteraan, yang dapat berpatisipasi pada pencapaian. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) oleh PBB (Glass & Newig, 2023). Untuk memperkuat keberlanjutan suatu negara, sangat penting untuk menyusun rencana tata kelola pemerintahan yang efektif dan mendorong partisipasi masyarakat melalui *platform* elektronik (e-partisipasi). Oleh karena itu, pengembangan e-partisipasi tidak hanya sekadar digitalisasi atau penerapan *online*, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keberlanjutan dengan menyediakan layanan yang lebih baik kepada warga secara efisien, yang pada gilirannya mendukung pencapaian keberlanjutan.

Penelitian ini menarik karena mengangkat topik yang membahas bagaimana pengaruh e-partisipasi terhadap kebijakan yang dirumuskan pemerintah untuk kesejahteraan warga negara. Pola tingkah laku masyarakat terus berkembang, dan pembangunan infrastruktur harus memenuhi kebutuhan tersebut. Kejahatan yang menghambat pembangunan negara muncul bersamaan dengan peningkatan tingkah laku masyarakat. Jadi, untuk mengatasi masalah yang menghambat kemajuan negara, hukum dan peraturan harus diterapkan. Korupsi adalah salah satu kejahatan

yang berdampak besar pada perkembangan negara. Namun, dengan adanya e-partisipasi memiliki potensi besar untuk menjadi alat yang berguna untuk mengendalikan korupsi dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pemerintahan melalui *platform* digital, transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan dan praktik korupsi dapat dihentikan.

Dalam era reformasi, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa perlu dilakukan untuk melaksanakan tugasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang berintegritas, berwibawa, dan bersih adalah alat kontrol untuk mengawasi pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaannya berdasarkan hukum administrasi negara melalui institusi formal maupun informal. E-partisipasi memiliki potensi yang besar untuk menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan karena masyarakat dapat berpatisipasi dalm pengambilan keputusan melalui survei *online*, forum diskusi, atau konsultasi publik. Hal ini membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Banyaknya layanan publik secara *online* seperti pembayaran pajak, perizinan, dan pengaduan dapat menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi pelayanan.

Manajemen publik yang lebih baik pada dasarnya adalah keterlibatan publik yang lebih besar, pengelolaan dana publik yang lebih transparan, kinerja organisasi yang lebih bagus, dan layanan publik yang lebih baik. Termasuk suara dan akuntabilitas yang mengacu pada tingkat pemberdayaan warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka tentang setiap anomali layanan publik, serta

pengendalian keputusan pemerintah yang memengaruhi kehidupan warga negara. Warga negara dapat membangun jaringan daring melalui mekanisme e-partisipasi, yang memungkinkan mereka untuk membangun ikatan sosial dengan orang lain dan menghasilkan suara kolektif.

E-partisipasi juga memberi masyarakat akses ke informasi dan layanan pemerintah, yang memungkinkan untuk memantau kegiatan tata kelola dan meminta pertanggungjawaban penyedia layanan (Wirtz dkk., 2018). Misalnya, studi kasus tentang proyek e-partisipasi Austria menemukan bahwa warga negara, terutama pemuda, mengkritik dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan layanan publik. Mereka juga meminta para politisi untuk bertanggung jawab atas layanan publik (Edelmann dkk., 2008).

Ketika masyarakat merasa aman untuk menyampaikan pendapat dan pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya maka warga negara akan termotivasi untuk belajar dan mengembangkan diri mereka melihat hasil dari upaya mereka berdampak pada kebijakan publik yang nantinya mendorong munculnya ide-ide baru dan inovasi yang dapat meningkatkan pembangunan manusia di masa depan untuk kesejahteraan warga negara.

Melalui e-partisipasi masyarakat dapat memberikan masukan dan mengawasi kebijakan pemerintah secara *real-time* dengan infrastruktur telekomunikasi yang memadai menjadi fondasi bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan menuntut akuntabilitass dari pemerintah. Akses yang mudah terhadap internet memungkinkan masyarakat untuk berpatisipasi dalam berbagai *platform* digital karena semakin baik infrastruktur telekomunikasi,

semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Negara-negara di Eropa dipilih dalam penelitian ini karena mereka umumnya memiliki infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik, menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan e-partisipasi. Banyak negara seperti Estonia dan Finlandia telah menjadi pelopor dalam *e-government*, memberikan pengalaman berharga tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, kebijakan yang mendukung transparansi dan partisipasi publik di kawasan ini menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan e-partisipasi berkembang dengan baik. Variasi dalam tingkat e-partisipasi di antara negara-negara Eropa juga memungkinkan analisis perbandingan yang menarik, serta menunjukkan bahwa masyarakat di kawasan ini lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Contoh *best practice* yang terdapat di Belanda antara lain administrasi bea cukai yang dapat dilakukan secara *online* sehingga dapat dikontrol dan mengurangi kasus suap. Di Inggris para warga negaranya dapat melakukan aplikasi dan pembaharuan paspor secara *online*.

Pemilihan negara-negara di Oseania dalam penelitian ini didasarkan pada upaya mereka untuk meningkatkan keterlibatan publik melalui teknologi digital. Negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru telah mengembangkan portal e-government yang memungkinkan warganya mengakses informasi dan memberikan masukan secara online. Meskipun tantangan seperti kesenjangan digital masih ada, Oseania menunjukkan potensi besar dalam memanfaatkan e-partisipasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. *Platform* e-partisipasi

di Selandia Baru disebut *Citizen Space*. Ini dirancang untuk memfasilitasi keterlibatan publik dan umpan balik untuk berbagai organisasi dan entitas pemerintah. *Citizen Space* memungkinkan warga untuk memberikan masukan, berpartisipasi dalam konsultasi publik, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Dari beberapa pertimbangan tersebut peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan menganalisis tentang faktor-faktor determinan e-partisipasi khususnya di negara Eropa dan Oseania.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengendalian korupsi terhadap e-partisipasi di negara Eropa dan Oseania?
2. Bagaimana pengaruh hukum dan peraturan terhadap e-partisipasi di negara Eropa dan Oseania?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas pemerintah terhadap e-partisipasi di negara Eropa dan Oseania?
4. Bagaimana pengaruh suara dan akuntabilitas terhadap e-partisipasi di negara Eropa dan Oseania?
5. Bagaimana pengaruh modal manusia terhadap e-partisipasi di negara Eropa dan Oseania?
6. Bagaimana pengaruh infrastruktur telekomunikasi terhadap e-partisipasi di negara Eropa dan Oseania?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh dari pengendalian korupsi terhadap e-partisipasi di negara Eropa dan Oseania
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh dari hukum dan peraturan terhadap e-partisipasi di negara Eropa dan Oseania
3. Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh dari efektivitas pemerintah terhadap e-partisipasi di negara Eropa dan Oseania
4. Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh dari suara dan akuntabilitas terhadap e-partisipasi di negara Eropa dan Oseania
5. Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh dari modal manusia terhadap e-partisipasi di negara Eropa dan Oseania
6. Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh dari infrastruktur telekomunikasi terhadap e-partisipasi di negara Eropa dan Oseania

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditargetkan mampu meningkatkan pengetahuan akademisi mengenai dampak tata kelola terhadap e-partisipasi melalui analisis pengendalian korupsi, hukum dan peraturan, efektivitas pemerintah, suara dan akuntabilitas, modal manusia, infrastruktur telekomunikasi yang dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan. Diharapkan juga dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan ilmu pengetahuan yang secara konseptual diajarkan di universitas.

I.4.2 Manfaat Praktis

Dari perspektif praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberi dukungan kepada pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mencegah korupsi, dan meningkatkan efisiensi layanan publik melalui e-partisipasi. Dengan demikian, diharapkan dapat memperkuat demokrasi dengan memberdayakan warga untuk mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

II.1 Teori Keagenan

Teori keagenan memberikan gambaran konflik dalam hubungan antara agen dan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan keagenan muncul juga pada organisasi sektor publik. Masyarakat bertindak sebagai prinsipal sedangkan pejabat publik bertindak sebagai agen.

Menurut Eisenhardt (1989: 59), teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi: (1) asumsi tentang sifat manusia, yang menekankan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). (2) asumsi tentang keorganisasian, yang menekankan bahwa antara anggota organisasi terjadi konflik, dan efisiensi dianggap sebagai standar produksi. (3) asumsi tentang informasi, adalah bahwa nformasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual-belikan. Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat diihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara aparat pemerintah dengan rakyatnya dipicu adanya sifat dasar tersebut. Aparat pemerintah dalam mengelola perusahaan

cenderung mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan untuk meningkatkan nilai suatu organisasi atau pemerintahan.

Dalam konteks e-partisipasi, pejabat publik sering kali memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya, yang dapat mengabaikan kepentingan masyarakat. E-partisipasi memberikan *platform* bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kepentingan publik lebih diperhatikan. Selain itu, e-partisipasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan mengawasi tindakan pejabat publik. Dengan mengurangi asimetri informasi, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menuntut pertanggungjawaban dari agen.

11.1.1 Definisi dan Konsep E-Partisipasi

Dari segi etimologi, partisipasi berarti keterlibatan. Andre dkk. (2006) menjelaskan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan individu atau komunitas dalam kegiatan, inisiatif, strategi, atau regulasi yang sedang dibahas dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan ini biasanya didorong oleh aspek emosional dan mental, yang membuat individu lebih sadar akan tindakan mereka dan mendorong mereka untuk berkontribusi dalam mewujudkan target yang telah ditentukan.

Salah satu pengertian kebernegaraan mencakup keterlibatan masyarakat. Berdasarkan prinsip partisipasi publik, setiap individu mempunyai hak untuk dapat ikut serta dalam proses pemerintahan dan pembangunan, yang merupakan bagian dari prinsip demokrasi. Pemberdayaan masyarakat, terutama dalam konteks pengambilan keputusan, merupakan inti dari partisipasi publik, menurut pandangan Schneider & Libercier (1995). Arnstein (1969) mengemukakan bahwa inti dari partisipasi publik terletak pada pengaturan kekuasaan, di mana pihak yang berkuasa, dalam hal ini pemerintah, bersedia untuk melibatkan masyarakat. Huraerah (2008) mengidentifikasi bahwa partisipasi publik terdiri dari beberapa bentuk:

1. Partisipasi dalam menyatakan pendapat dalam sebuah forum
2. Partisipasi dalam membantu orang lain
3. Partisipasi dalam bentuk materi maupun non materi
4. Partisipasi dalam kemampuan yang dimiliki dalam pekerjaan
5. Partisipasi dalam kegiatan sosial sebagai tanda kepedulian

Menurut Saebo dkk. (2008) e-partisipasi adalah ide tentang penggunaan teknologi informasi untuk mendorong dan memfasilitasi partisipasi publik dalam hal politik dan pemerintahan. Tujuan utam e-partisipasi adalah demi mendorong keikutsertaan masyarakat dalam mekanisme pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang bersifat trasnparansi, kolaboratif, deliberatif, inklusif dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Teknologi informasi

dipandang sebagai sarana yang efektif untuk mencapai keterlibatan publik, memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan umpan balik secara langsung.

Keterlibatan masyarakat dan komunikasi dengan lembaga pemerintah dalam proses pengambilan keputusan merupakan contoh dari e-partisipasi. E-partisipasi adalah elemen dari e-demokrasi yang fokus pada interaksi pemerintah dengan masyarakat (Macintosh, 2004). Dengan adanya e-partisipasi, partisipasi publik dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Bagi masyarakat, partisipasi secara daring memberikan akses kepada warga untuk memperoleh dan memahami informasi dari pemerintah, memperluas peluang untuk terlibat, serta mendukung proses partisipasi melalui berbagai teknologi yang dapat mengatasi perbedaan dalam kemampuan komunikasi dan keterampilan teknis di antara individu. Selain itu, e-partisipasi juga berpotensi mengurangi tekanan sosial dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan dukungan yang sangat berarti (Anduiza dkk., 2010)

II.1.2 Komponen E-Partisipasi

Menurut Walsh (2007), e-partisipasi dapat diterapkan dalam bentuk pelayanan yang bersifat resmi maupun tidak resmi. Layanan formal biasanya merupakan bagian dari kegiatan resmi pemerintah yang terstruktur dan memiliki standar yang jelas. Sebaliknya, e-partisipasi non-formal

dilakukan secara spontan, tidak terikat oleh aturan tertentu, dan sering kali dimulai dari inisiatif masyarakat.

Dalam konteks konseptual, e-partisipasi dapat dipecah menjadi beberapa aspek. Kalampokis dkk., (2008) mengemukakan bahwa model domain mereka terbagi menjadi tiga subdomain: stakeholder, proses partisipasi, dan alat e-partisipasi. Subdomain Stakeholder menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam e-partisipasi serta peran yang mereka mainkan. Setiap jenis e-partisipasi melibatkan kelompok stakeholder yang berbeda, tergantung pada proses bisnis yang sedang berlangsung. Stakeholder dalam partisipasi terdiri dua kategori utama: pemerintah dan masyarakat. Stakeholder pemerintah meliputi lembaga-lembaga negara yang biasanya berfungsi sebagai pelopor, pengamat, atau pengambil keputusan. Sementara itu, stakeholder publik terdiri dari masyarakat umum, komunitas non-pemerintah, sektor bisnis, *platform,* pendidikan, dan lainnya, di mana masyarakat berperan aktif dalam proses partisipasi tersebut.

Salah satu aspek penting dalam subdomain partisipasi adalah aktivitas partisipasi publik. Dalam konteks ini, akan dibahas berbagai jenis partisipasi yang dilakukan, jangkauan partisipasi, metode pelaksanaan, hasil yang diharapkan, tingkat keterlibatan, serta langkah-langkah dalam proses pembuatan kebijakan. Contoh-contoh partisipasi ini mencakup voting, diskusi publik, pengesahan petisi, mediasi, dan lain-lain. Selain itu, subdomain alat e-partisipasi mencakup berbagai elemen teknologi.

Stakeholder menggunakan saluran tertentu (*e-channel*) untuk berpartisipasi, baik melalui komputer maupun perangkat seluler. Melalui *e-channel* ini, mereka dapat mengakses aplikasi dan partisipasi yang termasuk dalam kategori alat. Kategori alat ini meliputi *e-polling*, e-forum, *e-petition*, *e-voting*, dan ruang diskusi.

Penerapan e-partisipasi dapat dibagi menjadi tiga tahap berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat, mulai dari partisipasi yang bersifat pasif hingga yang lebih aktif, menurut masyarakat UNDESA (UNDESA, 2014) Berikut adalah hasil kategorisasi tersebut:

1. Informasi e-publik adalah tahap yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dengan menyediakan data dan informasi publik serta memberikan akses kepada mereka untuk memperoleh informasi tersebut sesuai permintaan.
2. Konsultasi e-publik adalah tahap yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi dan menyampaikan pendapat mereka terkait penyusunan kebijakan publik.
3. Pengambilan keputusan e-publik adalah tahap partisipasi yang lebih mendalam, di mana masyarakat ikut serta sebagai rekan dalam merancang dan menyusun kebijakan, serta dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan undang-undang.

II.1.3 Bentuk Layanan E-Partisipasi

Dalam beberapa bentuk layanan publik, penerapan e-partisipasi muncul dalam berbagai model dalam partisipasi, mulai dari yang pasif sampai dengan yang aktif dalam berkolaborasi dan bekerja sama. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan e-partisipasi yang berbeda:

1. Penyediaan informasi secara daring

   Layanan daring merupakan *platform* yang memfasilitasi masyarakat untuk menjangkau informasi dan layanan pemerintah melalui internet. Dengan adanya layanan ini, warga dapat dengan mudah mendapatkan data, dokumen, dan informasi terkait kebijakan publik tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Penyediaan layanan secara daring juga mencakup pendaftaran untuk berbagai program, pengajuan izin, dan akses ke layanan administrasi lainnya. Hal ini bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas jangkauan layanan kepada publik, terkhusus bagi masyarakat yang berada di daerah pedalamam.

2. Layanan pengaduan dan aspirasi secara elektronik

   Layanan pengaduan dan aspirasi secara elektronik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, atau aspirasi mereka kepada pemerintah dengan cara yang lebih cepat. Melalui *platform* ini, warga dapat mengisi formulir pengaduan atau aspirasi secara *online*, yang kemudian akan diteruskan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Sistem ini

memungkinkan transparansi dan akuntabilitas, karena masyarakat dapat memantau status pengaduan mereka. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dapat meningkat, dan pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan warganya

3. Petisi (*petition*)

Petisi adalah bentuk partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk mengumpulkan dukungan untuk suatu isu atau kebijakan tertentu. Melalui *platform* e-partisipasi, warga dapat membuat petisi secara *online* dan mengajak orang lain untuk menandatangani sebagai bentuk dukungan. Petisi ini dapat digunakan untuk menyuarakan pendapat, menuntut perubahan, atau meminta perhatian pemerintah terhadap masalah yang dianggap penting. Dengan adanya petisi, masyarakat memiliki saluran yang efektif untuk menyampaikan aspirasi kolektif mereka, dan pemerintah dapat melihat isu-isu yang menjadi perhatian publik secara lebih jelas. Terdapat dua kategori petisi elektronik: formal dan non-formal. Petisi formal dikelola secara resmi oleh institusi pemerintah, seperti contoh yang dilakukan oleh Pemerintah Australia (*http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Petitions*), sedangkan petisi tidak resmi biasanya dikelola oleh organisasi non-pemerintah atau swasta, contohnya *Change.org*

4. Konsultasi Publik (*e-concultation*)

Konsultasi publik merupakan sebuah mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam mekanisme penyusunan keputusan melalui diskusi dan dialog resmi yang diinisiasi oleh pemerintah (Farhan dkk., 2007). Kegiatan ini sering kali dikenal dengan istilah uji publik, rapat dengar pendapat, atau pertemuan tatap muka yang diadakan dalam bentuk seminar, lokakarya, atau publikasi di media. Dengan adanya konsultasi publik, masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan dengan menyampaikan pandangan mereka mengenai proposal kebijakan yang direncanakan untuk diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, konsultasi publik juga dapat dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berbagai *platform*, seperti *email*, e-forum, *e-polling*, dan video konferensi, digunakan untuk menyampaikan aspirasi dan suara masyarakat..

II.2 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi E-Partisipasi

II.2.1 Pengendalian Korupsi

Menurut TI, korupsi yang dirasakan oleh orang atau perusahaan dikaitkan dengan praktik berisiko tinggi seperti menyuap untuk menjalankan bisnis, mendapatkan kontrak, atau memperoleh dokumen pemerintah sehari-hari (Andersen, 2009). Para peneliti menekankan bahwa pengendalian korupsi yang efektif dalam sistem pemerintahan dapat meningkatkan e-partisipasi

masyarakat dalam fungsi-fungsi publik. Ketika pemerintah berhasil mengendalikan korupsi, kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik meningkat, yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian korupsi yang baik menghasilkan transformasi sistem yang lebih besar dan meningkatkan akuntabilitas pegawai terpilih serta pemerintah atas kinerja mereka, yang pada gilirannya membantu mendorong partisipasi publik (Bertot & Jaeger, 2008). Selain itu, pengendalian korupsi yang efektif mengurangi kontak fisik antara penyedia layanan dan penerima layanan, sehingga mengurangi negosiasi dan eksploitasi yang tidak perlu (Ingrams & Schachter, 2019). Dengan meningkatnya transparansi sistem pemerintahan dan akses informasi yang lebih baik, masyarakat merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi secara elektronik, yang mengarah pada pengendalian korupsi yang lebih baik (Krishnan dkk., 2017). Menurut penelitian data lintas negara, akses warga negara ke internet yang lebih baik, yang sering kali terjadi di negara dengan tingkat korupsi yang rendah, meningkatkan transparansi penyedia layanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat (Andersen, 2009).

Orang-orang dapat dengan mudah berbagi informasi dan berbicara tentang masalah publik melalui mekanisme e-partisipasi, yang semakin meningkat ketika korupsi rendah. Ini meningkatkan

keterlibatan publik terhadap kebijakan pemerintah untuk bertindak lebih transparan dan bertanggung jawab. Menurut Lee dan Kim (2018), beberapa lembaga publik dan pemerintah telah menggunakan media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan *TikTok* untuk memudahkan warga mengikuti operasi pemerintah dengan lebih baik. Alat media sosial yang mendorong partisipasi ini, termasuk forum *online* dan ruang diskusi virtual, membantu pemerintah berbagi kewenangan publik dan mengumpulkan pendapat tentang masalah publik dan korupsi (Zheng, 2016).

Pemerintah Metropolitan Seoul meluncurkan sistem OPEN, yang berarti peningkatan prosedur *online* untuk aplikasi sipil, untuk meningkatkan e-partisipasi. Sistem ini membantu orang mengajukan permohonan layanan dan memantau proses persetujuan secara *real time* hingga pengambilan keputusan tentang aplikasi tersebut dibuat. Dengan pengendalian korupsi yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, yang pada gilirannya mendorong penggunaan sistem OPEN dan meningkatkan e-partisipasi di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian korupsi yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan e-partisipasi di pemerintah daerah Seoul secara signifikan (Hong & Cho, 2018). Contoh ini menunjukkan bahwa ketika korupsi rendah, maka akan memengaruhi penggunaan sistem

e-partisipasi sehingga meningkatkan keterlibatan publik dalam proses pemerintahan.

II.2.2 Hukum dan Peraturan

Setiap aspek kehidupan manusia telah terpengaruh oleh pesatnya perkembangan teknologi. Untuk mengembalikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, teknologi komunikasi internet (TIK) menjadi elemen krusial dalam regulasi yang dirancang untuk mempercepat distribusi informasi kepada masyarakat. Menurut Law & Lau (2006), pembuatan peraturan secara elektronik (*e-rulemaking*) merujuk pada pemanfaatan TIK dalam proses penyusunan peraturan, yang mencakup penyusunan draf undang-undang, pengumuman, pengumpulan reaksi publik, evaluasi peraturan, penerbitan peraturan, serta kepatuhan dan penegakan hukum.

Shulman dkk., (1987) menyatakan bahwa pemerintah di seluruh dunia menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu-isu lingkungan. Solusi untuk tantangan ini sangat bergantung pada ilmu pengetahuan yang mendasarinya, namun infrastruktur internet dapat menyediakan mekanisme yang dinamis untuk memfasilitasi partisipasi publik. Sebagai respons terhadap kemajuan dalam teknologi informasi, pemerintah di seluruh dunia mulai beradaptasi dalam proses pembuatan hukum modern. Mereka memanfaatkan program situs web untuk mengumpulkan masukan publik terkait

draf peraturan dan menjadikannya sebagai sarana untuk menyalurkan suara masyarakat (Shulman dkk., 1987). Teknologi berperan dalam menemukan cara-cara baru dalam proses pembentukan kebijakan (Williams, 2009), melalui mekanisme *e-rulemaking* yang mencakup pengesahan peraturan, pemberitahuan dan komentar publik, penyusunan draf undang-undang atau peraturan, serta kepatuhan dan penegakan hukum (Law dan Lau, 2006).

Teknologi digital, sebagai media publik yang inklusif, membuat mekanisme elektronik seperti berbagi informasi, masukan publik, dan pengambilan keputusan menjadi kenyataan. Secara bertahap, istilah tersebut menggambarkan tingkat keterbukaan *e-government* dalam berbagi informasi, pertimbangan, dan bahkan otoritas dalam konteks partisipasi publik dalam siklus kebijakan.

Hasil penelitian tentang praktik supremasi hukum di seluruh dunia secara keseluruhan telah menggambarkan kebutuhan, manfaat, dan hambatan. Salah satu manfaat pembuatan peraturan elektronik adalah sebagai berikut:

1. Ada kemungkinan yang signifikan untuk mengubah cara dan penggunaan informasi tentang peraturan; perbaikan operasi internal pemerintah; peningkatan transparansi dan keterlibatan publik; pembentukan mekanisme pertimbangan dan kolaborasi yang lebih produktif; penundaan yang lebih sedikit, penyederhanaan

terminologi, lebih konsisten dalam penyusunan format dokumen, lebih mudah dimengerti, dan hasil peraturan yang lebih baik; dan peningkatan kualitas dokumen.

2. Menjanjikan peluang baru untuk musyawarah publik dalam pembuatan peraturan; meningkatkan legitimasi demokrasi; meningkatkan pemahaman publik tentang pembuatan peraturan, membuat prosesnya lebih interaktif dan deliberatif, dan memudahkan lembaga yang bertanggung jawab secara demokratis, seperti legislatif, untuk mengawasi prosesnya; memastikan keputusan yang lebih baik, dan membuat lebih mudah bagi regulator untuk melihat data dalam jumlah yang lebih besar.

3. Meningkatkan fokus warga negara dalam penyusunan undang-undang, mendorong inovasi bisnis, dan berfungsi sebagai *platform* penelitian multidisipliner (Law dan Lau 2006); dan

4. Meningkatkan proses demokrasi konvensional, memberikan warga negara lebih banyak kesempatan teknis dan politik dalam proses politik, dan meningkatkan transparansi pemerintah (Harechko, 2011).

Hasil penelitian menunjukkan tiga keuntungan umum dari e-*rulemaking*: (i) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan internal pemerintah; (ii) meningkatkan mutu kebijakan publik; dan (iii) meningkatkan pemahaman, rasa memiliki, serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.

Hukum dan peraturan memiliki pengaruh signifikan terhadap e-partisipasi, karena regulasi yang jelas dan transparan dapat mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan adanya *e-rulemaking*, yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), masyarakat dapat memberikan masukan dan berpartisipasi dalam penyusunan peraturan dengan lebih mudah. Hal ini menciptakan mekanisme yang memungkinkan keterlibatan publik yang lebih luas, meningkatkan transparansi, dan memperkuat legitimasi demokrasi.

Namun, untuk mengoptimalkan e-partisipasi, diperlukan kerangka hukum yang komprehensif dan terstandarisasi, serta sumber daya yang memadai untuk mendukung sistem tersebut. Jika hukum dan peraturan tidak mendukung atau tidak jelas, maka e-partisipasi dapat terhambat, mengurangi efektivitas dan kualitas proses pembuatan kebijakan.

II.2.3 Efektivitas Pemerintah

Efektivitas pemerintah yang tinggi dapat mendorong e-partisipasi yang lebih besar. Ketika pemerintah dapat beroperasi dengan transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, orang lebih cenderung berpartisipasi dalam proses e-partisipasi. Menurut Bertot dan Jaeger (2008), pemerintah yang efektif membuat warga percaya pada pemerintah, yang kemudian

mendorong mereka untuk menggunakan *platform* digital untuk membuat keputusan.

Selain itu, Saebo dkk. (2008) menyatakan bahwa keberhasilan pemerintah dalam membuat dan menerapkan kebijakan dapat menyebabkan lingkungan yang mendukung e-partisipasi. Orang-orang akan lebih aktif berpartisipasi secara elektronik ketika mereka merasa suara mereka didengar dan diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah tidak hanya memengaruhi kualitas layanan publik, tetapi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Dengan demikian, efektivitas pemerintah dapat dianggap sebagai komponen penting yang memengaruhi tingkat e-partisipasi. Kinerja yang baik pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan warga dalam e-partisipasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan proses demokrasi dan kualitas layanan publik (Sivarajah dkk, 2016).

II.2.4 Suara dan Akuntabilitas

Suara publik yang kuat dan akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan e-partisipasi. Ketika warga negara merasa diberdayakan untuk menyuarakan pendapat mereka dan memiliki kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, mereka akan lebih cenderung untuk terlibat dalam mekanisme e-partisipasi.

Studi kasus di Austria menunjukkan bahwa warga, terutama pemuda, lebih cenderung memberikan umpan balik dan kritik terhadap layanan publik ketika mereka merasa memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan (Edelmann dkk., 2008). Karena suara kolektif dapat dibangun melalui jaringan *online*, hal ini menunjukkan bahwa e-partisipasi dapat meningkat.

Selain itu, Sivarajah dkk., (2016) menyatakan bahwa komunitas akan lebih cenderung menggunakan *platform* e-partisipasi ketika mereka merasa terlibat dan memiliki kendali atas keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, suara yang kuat dan akuntabilitas dapat menciptakan lingkungan yang mendukung e-partisipasi, di mana orang merasa memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan.

Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun e-partisipasi memungkinkan warga untuk menyuarakan pendapat mereka, ada juga tantangan yang dihadapi. Beberapa contohnya termasuk ketidaksetaraan akses teknologi, yang dapat mencegah kelompok yang kurang beruntung untuk berpartisipasi (Harrison & Sayogo, 2014). Namun, dalam negara-negara maju, di mana kesadaran akan berfungsi sebagai pendorong utama bagi e-partisipasi (Setiorini,MM., 2018).

II.2.5 Modal Manusia

Modal manusia merujuk pada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi perusahaan (Setiorini,MM., 2018). Dalam konteks keterlibatan elektronik, kemampuan seseorang untuk menggunakan sosial media untuk berpartisipasi dalam proses tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan disebut sebagai kekayaan manusia.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia di era yang semakin dinamis, ada berbagai masalah dan peluang yang terkait dengan sumber daya manusia saat ini. Karena transformasi digital yang cepat, banyak perusahaan tidak memiliki cukup tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan digital seperti *data analytics*, *artificial intelligence*, atau *cybersecurity*. Untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, perusahaan harus melatih kembali dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja mereka. Ini dapat menghambat kreativitas, produktivitas, dan daya saing bisnis di pasar global. Indeks kesejahteraan manusia atau yang lebih dikenal dengan *human capital* digunakan untuk menilai tingkat pembangunan manusia dan kualitas hidup di seluruh dunia.

Dalam indeks pembangunan manusia (IPM) mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan memperbaiki kualitas hidup, yang meliputi aspek-aspek seperti kesehatan,

pendidikan, tingkat kehidupan, kesetaraan gender, dan kebebasan individu. Tujuan dari indeks ini adalah untuk meningkatkan kemampuan setiap orang untuk hidup dengan lebih baik. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi biasanya menghasilkan sistem demokrasi yang lebih kuat dan kemajuan yang lebih baik untuk demokrasi. Ini karena tingkat pembangunan manusia yang tinggi dapat menghasilkan masyarakat yang lebih terdidik, lebih prima, dan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap informasi, sehingga mendorong partisipasi politik yang aktif dan mendukung pembangunan demokrasi (Shahraki dan Ghaderi 2021).

II.2.6 Infrastruktur Telekomunikasi

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang lebih luas dan efektif sangat penting dalam meningkatkan e-partisipasi warga negara. Akses yang lebih baik terhadap sinyal internet yang cepat dan stabil memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam *platform* digital yang mendukung e-partisipasi (Leible dkk., 2022). Ketika infrastruktur telekomunikasi diperkuat, terutama di wilayah yang tertinggal yang sering mengalami hambatan biaya dan literasi rendah, potensi e-partisipasi dapat dimaksimalkan.

Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (TII) memainkan peran penting dalam mengevaluasi kapasitas suatu negara untuk mengembangkan *e-government* dan e-partisipasi secara lebih luas. Menurut Survei E-Pemerintahan PBB 2024, infrastruktur yang kuat

tidak hanya menyediakan layanan digital, tetapi juga memudahkan interaksi *online* antara warga negara dan pemerintah.

Setiap indeks memiliki nilai normalisasi yang berbeda; Indeks Layanan Daring (OSI) menilai kualitas dan cakupan layanan *online*; Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (TII) menilai status pengembangan infrastruktur telekomunikasi; dan Indeks Modal Manusia (HCI) menilai pengembangan modal manusia. EGDI dihitung sebagai rata-rata tertimbang yang sama dari nilai normalisasi dari ketiga indeks ini. Untuk memastikan kapasitas suatu negara untuk mengembangkan *e-government*, TII memainkan peran penting dalam mengevaluasi sistem informasi dan komunikasi yang tersedia.

Infrastruktur yang kuat sangat penting untuk menyediakan layanan digital dan memfasilitasi interaksi *online* antara warga negara dan pemerintah. Untuk melengkapi tiga subindeks yang ada: perkiraan jumlah pemakai internet per 100 penduduk, jumlah langganan seluler per 100 penduduk, dan jumlah langganan pita lebar nirkabel per 100 penduduk, survei *e-government* 2024 memasukkan peningkatan besar dalam TII dan indikator langganan pita lebar tetap. Peningkatan dalam indikator-indikator ini menunjukkan bahwa negara dengan infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik cenderung memiliki tingkat e-partisipasi yang lebih

tinggi, karena warga negara memiliki akses yang lebih baik untuk menyuarakan pendapat mereka dan berinteraksi dengan pemerintah.

II.3 E-Partisipasi di Negara Eropa dan Oseania

II.3.1 Penggunaan E-Partisipasi di Negara Eropa

Negara-negara di Eropa umumnya menggunakan e-partisipasi karena infrastruktur teknologi yang baik dan kebijakan pemerintah yang mendukung transparansi dan partisipasi publik. Banyak negara di Eropa telah mengembangkan *platform* e-partisipasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, berpartisipasi dalam konsultasi publik, dan memberikan masukan. E-partisipasi telah terbukti bermanfaat di Belanda untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal. Pemerintah Jerman Bavaria mengubah cara pemilunya dengan menerapkan teknologi digital, yang memungkinkan pemilih memberikan suara mereka secara *online*. *Platform* seperti "*Your Voice*" di Belanda dan "*Citizen Space*" di Inggris merupakan contohnya. Dengan menerapkan regulasi dan inisiatif seperti *Digital Single Market*. Di Eropa, e-partisipasi tidak hanya terbatas pada pemilihan umum; itu juga mencakup partisipasi dalam pembangunan kebijakan, perencanaan kota, dan masalah lokal. Ini membantu masyarakat lebih terlibat dalam proses demokrasi.

Berdasarkan UN Global *E-government Survey* 2003 Eropa memiliki kesiapan *e-government* teratas setelah Amerika Serikat dimana wilayah-wilayah terkemuka di Eropa telah berupaya meningkatkan penyampaian layanan yang efisien kepada publik serta memasukkan partisipasi yang lebih besar dalam kebijakan publik secara daring. Lingkungan yang mendukung mampu mempertahankan perluasan program *e-government* yang dicanggih di masa mendatang. Program *e-government* yang berhasil mencerminkan keinginan suatu negara untuk berbagi informasi dan pengetahuan dengan rakyatnya. Sejarah panjang perkembangan politik, demokrasi, dan kemandirian sektor wisata serta berbagai organisasi di negara-negara ini mengharuskan pemerinta bersikap terbuka dan melibatkan rakyatnya untuk berpatisipatif.

Berdasarkan UN Global *E-Government Survey* 2003 terdapat variasi yang luas dalam kesiapan *e-government*. Secara umum, negara-negara seperti Swiss (0,764), Jerman (0,762), Belanda (0,746), dan Austria (0,676) lebih siap untuk *e-government* daripada negara-negara di Eropa Timur dan Selatan. Sementara Polandia (0,576) dan Bulgaria (0,548) adalah pemimpin di Eropa Timur, mereka tetap jauh di bawah negara-negara Eropa lainnya, seperti negara-negara di Eropa Selatan, seperti Italia (0,685), Portugal (0,646), dan Malta (0,636).

Banyak negara di Eropa Timur, terutama negara-negara dengan ekonomi dalam transisi, tetap dibatasi oleh kurangnya keuangan dan infrastruktur saat mereka mencoba mereformasi ekonomi mereka. Program e-pemerintahan di Albania (0,311), Bosnia & Herzegovina (0,309) dan Serbia & Montenegro (0,371) berada pada tahap awal pengembangan dengan penyediaan informasi dan layanan yang sebagian besar terbatas.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan program *e-government* di sebagian besar negara Eropa adalah strategi *e-government* yang komprehensif dan dipikirkan dengan matang. Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya, para pemimpin global telah dengan cepat mencari reformasi regulasi dan administratif yang diperlukan untuk integrasi jaringan *e-government* ke dalam interaksi G2G dan G2C. Seiring berjalannya waktu, hal ini telah berkembang menjadi fokus pada penggunaan portal *one-stop-shop* untuk penyampaian informasi dan layanan terpadu demi kenyamanan, efektivitas, dan pemberdayaan.

II.3.2 Penggunaan E-Partisipasi di Negara Oseania

E-Partisipasi di Oseania mencakup penggunaan teknologi digital untuk membuat masyarakat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Negara-negara di kawasan ini telah mengambil berbagai langkah untuk membantu warga lebih terlibat dalam pemerintahan. Banyak negara di Oseania, seperti Australia

dan Selandia Baru, telah mengembangkan portal *e-government* yang memungkinkan warganya mengakses informasi dan memberikan masukan secara *online*. E-partisipasi di Oseania mendorong orang untuk terlibat dalam konsultasi publik, survei, dan forum diskusi yang diadakan secara *online*. Pemerintah Oseania sering meluncurkan kampanye melalui *platform* digital untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi publik.

Australia adalah pemimpin regional di antara kelompok yang terdiri dari Oseania. Australia (0,831) dan Selandia Baru (0,178) memiliki peringkat kesiapan *e-government* yang lebih tinggi dari rata-rata dunia dan termasuk di antara para pemimpin global dalam *e-government*. Australia *http://www.fed.gov.au*, *http://jobsearch.gov.au* memiliki portal federal yang luas dan sangat mudah digunakan yang menggunakan sistem menu tab untuk menyediakan akses cepat ke banyak informasi bagi para penggunanya. Situs ini menyediakan fitur personalisasi seperti langganan siaran pers kata kunci dan akses ke direktori daring pemerintah persemakmuran yang komprehensif. Australia juga merupakan rumah bagi mungkin basis data pekerjaan terbesar di dunia, yang diperbarui setiap 20 menit. Dan situs ini menyediakan formulir komentar web berdurasi 60 detik tentang cara meningkatkannya.

Sebagai kesimpulan, tidak ada model yang dapat digunakan untuk membangun *e-government*. Saat ini, ada banyak situs web e-partisipasi yang tersebar di seluruh dunia. Situs web negara bagian dan sektoral menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penyediaan informasi *online* dan layanan publik dasar di antara negara. Keadaan dan kesiapan e-partisipasi suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pembangunan ekonomi, teknologi, dan sumber daya manusia. Model politik dan ekonomi serta ketidakadilan dalam hal modal finansial, manusia, dan teknis adalah faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan layanan e-partisipasi.

Di negara berkembang seperti Fiji, Tonga, Vanuatu, Samoa, dan New Zealand, perbedaan digital antara yang memiliki dan yang tidak memiliki e-partisipasi semakin besar. Karena perbedaan dalam pengembangan sumber daya manusia dan telekomunikasi di antara negara-negara, penggunaan e-partisipasi untuk pemberdayaan masyarakat dan pengetahuan menjadi sangat sulit. Di negara-negara berkembang, segelintir individu yang memiliki hak istimewa saat ini dapat mengakses informasi dan layanan publik melalui jaringan e-partisipasi. Beberapa negara berkembang telah mengambil langkah maju yang signifikan meskipun menghadapi tantangan. Contoh-contoh ini menunjukkan model janji e-partisipasi. Pendekatan multi-cabang terhadap e-partisipasi yang didasarkan pada pengembangan

infrastruktur TIK manusia serta telekomunikasi apabila digunakan secara efektif, e-partisipasi dapat ditingkatkan di seluruh dunia.

II.4 Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya telah melihat bagaimana penerapan e-partisipasi dengan menganalisis pengendalian korupsi, hukum dan peraturan, efektivitas pemerintah, suara dan akuntabilitas, modal manusia dan infrastruktur telekomunikasi. Tabel 1.1 menunjukkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah mendukung temuannya.

Tabel : 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
1.	Wahed Waheduzzaman, Saron Khandaker (2022)	E-Partisipasi	-Suara dan Akuntabilitas -Persepsi Korupsi -Efektivitas Pemerintah	Penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas pemerintah, pengendalian korupsi berperan penting dalam mendorong e-partisipasi. Ketika pemerintah berfungsi secara efektif dan mampu mengurangi tingkat korupsi maka warga negara akan lebih percaya pada sistem pemerintahan dan termotivasi untuk terlibat dalam e-partisipasi. Namun suara dan akuntabilitas tidak berdampak pada e-partisipasi karena tidak

				cukup dalam memastikan suara warga negara.
2.	Mahmood (2004)	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Tingkat Korupsi	Hasil penelitian menekankan pentingnya konteks lokal dan cara implementasi TIK. Dalam beberapa kasus, TIK tidak selalu berhasil mengurangi korupsi jika tidak didukung oleh kebijakan yang tepat dan komitmen dari pihak berwenang.
3.	Meijer (2016)	-Tata Kelola Kota Pintar	Governance	Menggali berbagai tantangan yang dihadapi *smart urban* termasuk privasi data, keterlibatan publik dan pengelolaan kompkeksitas teknologi dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpatisipasi dalam pengambilan keputusan.
4.	Haliim (2016)	-Partisipasi Masyarakat -Demokrasi Deliberatif	-Responsivitas Hukum -Kualitas Demokrasi	Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum yang kuat dan responsif berperan penting dalam memengaruhi tingkat e-partisipasi di masyarakat. Ketika kerangka hukum yang ada mendukung partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, mereka merasa

				lebih aman dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam *platform* e-partisipasi.
5.	Wahed Waheduzzaman (2024	Index Pendidikan	-Pengendalian Korupsi -Persepsi Korupsi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan statistik yang signifikan antara kontrol korupsi dan e-partisipas. Meskipun kontrol korupsi merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi tidak secara langsung memengaruhi e-partisipasi, faktor-faktor lain seperti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dak aksesibilitas *platform* partisipasi, mungkin memiliki peran yang lebih signifikan dalam mendorng keterlibatan warga negara.
6.	Hsieh dkk (2013)	-Kualitas layanan web -Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi *e-government*	Penilaian terhadap layanan *e-government*	Secara keseluruhan, penelitian tentang penilaian layanan web *e-government* dapat memberikan dasar untuk memahami bagaimana efektivitas pemerintah memengaruhi e-partisipasi. Kualitas layanan yang tinggi dan efektivitas pemerintah

				dapat saling mendukung dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan melalui *platform* digital.
7.	Gulati (2014)	-Kualitas layanan *online* -Faktor-faktor yang mempengaruhi e-partisipasi	E-Partisipasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan *online* berpengaruh signifikan terhadap tingkat e-partisipasi di berbagai negara, dengan faktor-faktor tertentu yang memoderasi hubungan tersebut.
8.	Gultom (2024)	Penerapan teknologi informasi dalam *e-government*	Efisiensi dan Efektivitas *e-government* dalam administrasi publik	Penelitian ini menjelaskan bahwa dengan adanya *e-government* dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat namun terdapat tantangan dalam meningkatkan digitalisasi dalam masyarakat yang masih gagap teknologi
9.	Kneur, M., & Harnisch,S. (2016)	*E-Government* E-Partisipasi	-Tingkat partisipasi warga -Kualitas pemerintahan	Hasil penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kedua jenis pemerintahan dalam menerapkan *e-government* dan e-partisipasi, dan menunjukkan bahwa penyebaran *e-government* dan

				e-partisipasi berbeda antara negara demokrasi dan otokrasi, karena teknologi digital cenderung meningkatkan partisipasi dan kualitas pemerintahan.
10.	Agnes Batory & Sara Svensson (2020)	Persyaratan hukum untuk kolaborasi yang diatur dalam undang-undang dan regulasi di sepuluh negara Eropa	Tingkat kolaborasi antara lembaga pemerintah dan aktor masyarakat.	Studi menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini berfungsi sebagai dasar untuk kerja sama, tetapi praktik kerja sama dapat berbeda tergantung pada situasi dan kebutuhan praktis di masing-masing negara artinya elemen non hukum berdampak lebih besar pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan digital.
11.	Nur Hidayatullah dan Achmad Nurmandi (2022)	-Pengembangan smart cities -Infrastruktur inromasi dan komunikasi (ICT) -Strategi partisipasi masing-masing negara (Spanyol, Italia, Amerika Serikat, Jerman)	E-Partisipasi	Hasil penelitian ini menujukkan bahwa infrastruktur telekomunikasi tidak selalu memiliki pengaruh yang dignifikan terhadap e-partisipasi

II.5 Kerangka Pemikiran

Dalam era digital saat ini, e-partisipasi menjadi konsep yang semakin penting karena TIK memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. indeks e-partisipasi mengukur seberapa banyak orang yang menggunakan *platform* digital untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

Beberapa kategori memengaruhi indeks e-partisipasi, termasuk infrastruktur telekomunikasi, modal manusia, efektivitas pemerintah, kontrol korupsi, dan suara dan akuntabilitas. Faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah pengendalian korupsi. Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan lebih tinggi di negara dengan tingkat korupsi yang rendah. Jika orang percaya bahwa pemerintah transparan dan akuntabel, mereka lebih cenderung berpartisipasi secara elektronik.

Prinsip hukum dan peraturan menjamin bahwa semua orang dan organisasi, termasuk pemerintah, terikat oleh hukum. Negara dengan sistem hukum yang kuat dan adil akan mendorong partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat dilindungi, mereka lebih cenderung menggunakan *platform digital* untuk menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan publik yang baik atau efektivitas pemerintah juga berpengaruh terhadap e-partisipasi. Pemerintah yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas dan menyediakan akses yang mudah ke layanan publik. Ketika orang percaya bahwa pemerintah dapat memenuhi kebutuhan mereka, mereka cenderung berpartisipasi secara elektronik.

Suara dan akuntabilitas menunjukkan seberapa besar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan seberapa tanggung jawabnya pemerintah atas apa yang mereka putuskan atas kebijakan yang mereka buat. Negara-negara yang memberikan kebebasan berbicara dan kesempatan bagi orang-orang untuk berpartisipasi dalam proses politik cenderung memiliki lebih banyak orang yang berpartisipasi secara elektronik.

Untuk meningkatkan e-partisipasi, modal manusia yang mencakup keterampilan dan pendidikan, sangat penting. Melalui jenjang pendidikan yang bagus masyarakat akan cenderung lebih antusias untuk menggunakan teknologi untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Pendidikan yang baik menyediakan masyarakat dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan *platform* digital.

Infrastruktur telekomunikasi yang baik., akses yang luas dan berkualitas tinggi terhadap internet dan teknologi informasi sangat

penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak akan dapat menggunakan *platform* digital yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan jika tidak ada infrastruktur yang memadai. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana negara-negara di Eropa dan Oseania dapat menganalisis faktor faktor determinan e-partisipasi yang terdiri dari pengendalian korupsi, hukum dan peraturan, efektivitas pemerintah, suara dan akuntabilitas, modal manusia dan infrastruktur telekomunikasi untuk meningkatkan partisipasi publik.

II.6 Hipotesis Penelitian

Ada sejumlah hipotesis yang dapat dibuat tentang manfaat dari pengendalian korupsi, hukum dan peraturan, efektivitas pemerintah, modal manusia, suara dan akuntabilitas, dan infrastruktur telekomunikasi terhadap e-partisipasi. Penerapan hukum yang tegas dan pengendalian korupsi meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jika masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan infrastruktur telekomunikasi yang kuat, mereka akan lebih aktif berpartisipasi secara digital, meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Selain itu, pengembangan modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan akan membuat orang lebih mampu

berpartisipasi dalam e-partisipasi. Ini akan membantu lembaga pemerintah beroperasi dengan lebih jelas dan responsif. Selain itu, pengembangan hipotesis ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat akan meningkat jika pemerintah dapat mengelola sumber daya dan menyediakan layanan publik yang berkualitas tinggi.

II.6.1 Pengaruh Pengendalian Korupsi Terhadap E-Partisipasi

Waheduzzaman & Khandaker (2022) meneliti tentang bagaimana kolaborasi antara penyedia layanan dan penerima layanan sangat penting untuk mengendalikan korupsi. Penelitian ini sejalan dengan teori *co-creation*. Dalam situasi seperti ini, pengendalian korupsi yang efektif dapat menghasilkan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya akan mendorong e-partisipasi masyarakat. Ketika orang merasa bahwa pemerintah bertindak dengan integritas dan bahwa ada mekanisme yang efektif untuk mengawasi korupsi, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam *platform* digital yang dimiliki pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian korupsi yang mampu secara efektif dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang merupakan komponen penting dalam meningkatkan partisipasi.

Selain itu, Waheduzzaman & Khandaker (2022) mengatakan bahwa e-partisipasi seharusnya dianggap sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan memberdayakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan peningkatan kontrol korupsi, masyarakat akan merasa lebih nyaman untuk menyuarakan pendapat mereka melalui *platform* e-partisipasi. Sebaliknya, tingkat korupsi yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat menjadi apatis dan enggan berpartisipasi karena mereka meragukan kemampuan suara mereka untuk memengaruhi keputusan publik. Oleh karena itu, adanya hubungan yang signifikan antara pengendalian korupsi dan e-partisipasi.

Sebaliknya, Mahmood (2004) menyatakan bahwa temuan studi sebelumnya tentang negara berkembang masih tidak konsisten, karena dalam beberapa kasus pengendalian korupsi yang buruk dapat menghambat e-partisipasi. Tanpa kebijakan yang jelas dan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, orang mungkin menjadi skeptis dan tidak terlibat dalam *platform* digital pemerintah.

Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim dkk. (2009). Mereka menemukan bahwa perbaikan proses permohonan sipil *online* (OPEN) di pemerintah kota Seoul dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akibatnya, hipotesis penelitian berikut menunjukkan bahwa pengendalian korupsi yang efektif

meningkatkan e-partisipasi warga negara. Ketika masyarakat melihat pemerintah berkomitmen untuk mengendalikan korupsi, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi.

H1: Pengendalian korupsi berdampak positif terhadap e-partisipasi

II.6.2 Pengaruh Hukum dan Peraturan Terhadap E-Partisipasi

Menurut (Riskiyono, 2015) partisipasi tidak cukup hanya dilakukan oleh beberapa orang yang duduk di lembaga perwakilan, karena situasi dalam insititusi politik cenderung menggunakan politik atas nama kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan kelompok atau kelompok pribadi. Oleh sebab itu, dalam kegiatan wakil rakyat juga perlu ada ruang partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam proses kebijakan pembentukan peraturan perundang undangan.

Pemerintah harus membuka semua informasi, terutama informasi umum, di era berkembangnya teknologi informasi. Salah satu metrik utama pembentukan kota pintar adalah bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan yang lebih baik (*smart decision-making*) (Meijer, 2016). Ini adalah salah satu tujuan kota-kota di seluruh dunia saat ini.

Selain itu, banyak penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi akan membantu badan publik, termasuk

pemerintah dan lembaganya, mencapai tujuan mereka dengan lebih baik. Karena orang berinteraksi satu sama lain dengan informasi yang dikirimkan, keterbukaan informasi dapat membantu badan publik membuat kebijakan yang lebih akurat, efisien, dan efektif (Yang & Maxwell, 2011). Namun, hal yang paling krusial dalam mendukung transparansi informasi adalah bahwa komunitas politik atau legislatif membantu membuat peraturan dan dasar hukum yang memungkinkan keterbukaan informasi yang luas di seluruh lembaga pemerintahan. Perundang-undangan yang mendukung keterbukaan informasi dapat meningkatkan hubungan, mengurangi risiko, dan meningkatkan kepercayaan lembaga pemerintah (publik) dengan tujuan untuk membuka dan berbagi informasi (Criado dkk., 2013).

Walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam praktik pelaksanaan pemerintahan saat ini, birokrasi dan lembaga eksekutif dituntut untuk memecahkan masalah publik. Namun, masalah-masalah ini kemudian menjadi sumber masalah sendiri. Patologi, yang disebut sebagai penyakit birokrasi, menjadi jamur yang tidak dapat dihilangkan di birokrasi kita (Sawir, 2020).

Sementara itu, lembaga legislatif yang dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat (konstituennya) dan mengawasi dan mengontrol kinerja birokrasi akhirnya kehilangan komitmen karena kepentingan individu dan kelompok yang lebih besar (Haliim, 2016). Lembaga yudikatif yang didirikan untuk

menegakkan keadilan mudah "dibeli" oleh pihak yang berkuasa atau kelompok yang mementingkan kepentingan mereka sendiri. Pada akhirnya, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan pada pemerintah, dan berbagai bentuk penolakan muncul sebagai hasil dari keraguan masyarakat terhadap pemerintah. Karena keraguan ini, seringkali terjadi tindakan anarkis di masyarakat, yang seringkali diakhiri dengan represi pemerintah. Sehingga disimpulkan hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Hukum dan peraturan berdampak positif terhadap e-partisipasi

II.6.3 Pengaruh Efektivitas Pemerintah Terhadap E-Partisipasi

Menurut (Puspitasari, 2017), keberhasilan sistem informasi terdiri dari tiga dimensi: kualitas informasi, sistem, dan layanan. Tiga dimensi ini berkontribusi pada kepuasan pengguna dan penggunaan sistem. Dalam *e-government*, pengguna dapat menilai layanan melalui rincian informasi yang disediakan oleh pemerintah. Deskripsi layanan yang jelas dan meyakinkan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap *platform*.

Jika pemerintah dapat memberikan informasi yang tepat waktu, menyeluruh, dan akurat tentang layanan tertentu, kepercayaan masyarakat akan meningkat. Orang akan lebih cenderung berpartisipasi secara aktif jika portal *e-government* dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan fungsi sistem yang fleksibel dan layanan yang lancar. Hal ini menunjukkan bahwa layanan

pemerintah yang dapat diandalkan meningkatkan e-partisipasi (Teo dkk., 2008).

Tidak banyak bukti empiris yang mendukung hubungan antara penerapan *e-government* pemerintah dan partisipasi (Hsieh dkk., 2013). Ini terjadi di negara berkembang seperti Nigeria. Meskipun pemerintah Nigeria telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam teknologi informasi untuk mempercepat layanan dan meningkatkan partisipasi warga, hasil survei menunjukkan bahwa Nigeria berada di peringkat rendah dalam Indeks Pengembangan *E-government* PBB (UNEGDI) pada tahun 2018 dan 2019.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H3: Efektivitas pemerintah berdampak positif terhadap e-partisipasi

II.6.4 Pengaruh Suara dan Akuntabilitas Terhadap E-Partisipasi

Di satu sisi, gagasan tata kelola era digital menyarankan model tata kelola yang sederhana, moral, bertanggung jawab, responsif, dan transparan. Di sisi lain, gagasan ini memberikan dasar teoritis untuk memahami bagaimana suara dan akuntabilitas dapat memengaruhi e-partisipasi. Pertama, akuntabilitas pemerintah dan pengakuan suara warga negara mendorong partisipasi publik. Akibatnya, warga negara merasa lebih mampu dan termotivasi untuk terlibat dalam proses politik, sehingga mengurangi kerentanan

informasi dan memberikan suara kepada kelompok marjinal (Gulati dkk., 2014).

Kedua, dengan memperkuat suara dan akuntabilitas, tata kelola era digital memudahkan partisipasi publik dan dapat mengatasi masalah "kelelahan konsultasi" dalam proses pengambilan kebijakan politik. Ketiga, dengan adanya jaringan digital dan virtual yang mendukung suara dan akuntabilitas, partisipasi politik menjadi lebih yakin. Menurut Tai dkk. (2020), jaringan interaktif yang menggabungkan penguatan dan mobilisasi dapat meningkatkan kinerja politik warga negara dan mendorong mereka untuk berpartisipasi.

Sebaliknya, untuk memahami sejauh mana suara dan akuntabilitas dapat menjamin dan mengembangkan e-partisipasi, gagasan tata kelola era digital menjadi sangat relevan. Konsep tata kelola era digital telah digunakan dalam pembangunan pemerintahan digital untuk mendorong transformasi pemerintahan menuju transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi publik (John dkk., 2011). Konsep ini berfokus pada publik dan bertujuan untuk memberikan layanan publik yang efisien dan berkualitas tinggi kepada warga negara, menciptakan manfaat ekonomi selain nilai-nilai publik politik dan sosial.

Tujuan pemerintahan digital, menurut teori nilai publik, adalah untuk meningkatkan nilai-nilai sosial seperti transparansi, efisiensi, partisipasi, demokrasi, dan inklusi (Mergel, 2014). Dengan menggunakan e-informasi, konsultasi, dan keputusan, seperti dengar pendapat *online*, jajak pendapat publik, dan pemilihan umum, masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik dan membangun e-demokrasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suara yang kuat dan akuntabilitas meningkatkan e-partisipasi.

H_4: Suara dan akuntabilitas berdampak positif terhadap e-partisipasi

II.6.5 Pengaruh Modal Manusia Terhadap E-Partisipasi

Komponen modal manusia berkontribusi pada kemajuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Modal manusia yang kuat memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, memberikan masukan, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat. Dengan meningkatkan keterampilan, kesehatan, dan pendidikan, masyarakat akan lebih terlibat dalam pengambilan keputusan, termasuk dengan e-partisipasi.

Modal manusia yang baik membuat masyarakat lebih berani menangani masalah seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kesetaraan gender. Orang-orang dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup dapat dengan lebih efektif menyuarakan pendapat mereka untuk memengaruhi kebijakan pemerintah dan

memastikan kebutuhan mereka dipenuhi (Dema dkk., 2020) Akibatnya, penelitian ini berpendapat bahwa pengembangan modal manusia dapat meningkatkan e-partisipasi dengan meningkatkan akses ke layanan dasar dan meningkatkan inklusi sosial dan ekonomi.

Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan keterbatasan pengetahuan karena rendahnya pendidikan dapat menghambat partisipasi yang optimal. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengatasi masalah ini agar semua lapisan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan mereka secara maksimal. Dengan demikian, peningkatan modal manusia akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat (Gultom dkk., 2024). Sehingga, hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa modal manusia berpengaruh positif terhadap e-partisipasi.

H_5: Modal manusia berdampak positif terhadap e-partisipasi

II.6.6 Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi Terhadap E-Partisipasi

Individu lebih mudah terlibat dalam proses e-partisipasi seperti konsultasi *online*, pengambilan keputusan publik, dan partisipasi dalam forum digital jika mereka memiliki akses ke jaringan internet yang cepat dan stabil serta teknologi komunikasi yang mudah diakses (Bagaskara dkk., 2023). Infrastruktur yang

memadai memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan *platform* yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi secara aktif, meningkatkan keterlibatan mereka dalam aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan dan komunitas. Akibatnya, hipotesis yang diajukan adalah bahwa peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur telekomunikasi berdampak positif terhadap tingkat keterlibatan elektronik masyarakat.

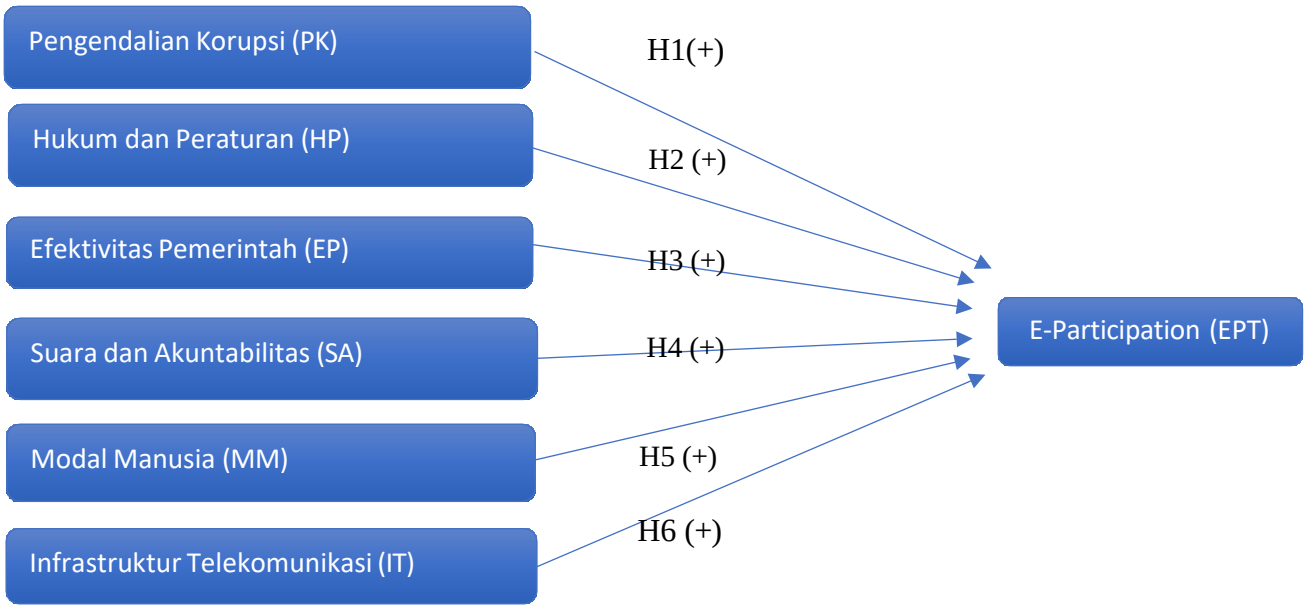
Kesenjangan digital, yang sering menghalangi kelompok tertentu, seperti masyarakat pedesaan atau kelompok berpendapatan rendah, untuk berpartisipasi secara aktif, dapat dikurangi dengan infrastruktur telekomunikasi yang baik. E-partisipasi dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan pemerintah dengan menurunkan hambatan akses. Selain itu, berpartisipasi dalam *platform* digital membantu masyarakat memperoleh keterampilan digital yang penting, yang semakin penting di era teknologi modern. Oleh karena itu, infrastruktur telekomunikasi yang kuat membantu e-partisipasi dan mempromosikan pemberdayaan masyarakat dan penguatan demokrasi.

Meskipun infrastruktur telekomunikasi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik, terdapat kemungkinan bahwa infrastruktur yang ada justru sebaliknya menguntungkan atau bahkan mempersulit partisipasi masyarakat. Masyarakat yang kurang teredukasi atau tidak memahami teknologi mungkin enggan

terlibat dalam *platform* digital (Tyas dkk., 2019). Selain itu, ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau ketidakpuasan terhadap proses pengambilan keputusan dapat menghalangi orang untuk berpartisipasi, terlepas dari infrastruktur telekomunikasi yang ada.

Selain itu, jika konten dan relevansi informasi yang disediakan di *platform* digital tidak menarik atau tidak relevan bagi masyarakat, mereka mungkin tidak termotivasi untuk berpartisipasi, meskipun infrastruktur telekomunikasi tersedia. Oleh karena itu, hipotesis yang tidak menguntungkan ini menunjukkan bahwa infrastruktur telekomunikasi yang tidak efektif dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga disimpulkan hipotesis dari penelitian ini adalah:

H_6: Infrastruktur telekomunikasi berdampak positif terhadap e-partisipasi



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini menggunakan data yang telah tersedia untuk umum dalam melakukan analisis. Secara khusus penelitian ini menggunakan EPI (*E-Participation Index*) sebagai ukuran kesiapan e-partisipasi di pemerintahan. EPI diterbitkan oleh UN-DESA dan mengkur ketersediaan alat e-partisipasi pada portal pemerintah nasional di 193 Negara, dengan fokus pada informasi daring, konsultasi publik daring dan pengambilan keputusan elektronik. Penelitian ini melibatkan penelitian data panel selama enam tahun yaitu 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 dan 2020.

Sampel merupakan sekelompok individu atau objek yang populasi lebih besar untuk tujuan penelitian atau analisis. Sampel dipilih dengan cara tertentu agar dapat mewakili karakteristik, perilaku, atau atribut dari populasi secara keseluruhan. Dalam penelitian, penggunaan sampel memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan dan analisis tanpa harus mengkaji seluruh populasi, yang sering kali tidak praktis atau tidak mungkin dilakukan. Dengan memilih sampel yang tepat, peneliti dapat menarik kesimpulan yang valid dan relevan mengenai populasi yang diteliti, serta menggeneralisasi temuan mereka ke populasi yang lebih luas.

Berikut adalah kriteria pemilihan sampel:

1. Data indeks modal manusia dan infrastruktur telekomunikasi berasal dari UN *E-Government Survey* 2010-2020.
2. Data indeks suara dan akuntabilitas, efektivitas pemerintah, hukum dan peraturan, pengendalian korupsi berasal dari *The Worldwide Governance Indicators* (WGI).

Berdasarkan data pengelompokan sampel tersebut, maka didapatkan 57 dari 193 Negara tercatat di UN *E-Government* PBB dan *The Worldwide Governance Indicator* (WGI) yang cocok untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Faktor ini disebabkan karena peneliti memilih Benua Eropa dan Oseania.

Tabel 3.1 Daftar Sampel Negara

No	Negara	Kode
1	Albania	ALB
2	Andorra	ADO
3	Austria	AUT
4	Belarus	BLR
5	Belgium	BEL
6	Bosnia and Harzegovina	BIH
7	Bulgaria	BGR
8	Croatia	HRV
9	Czech Republic	CZE
10	Denmark	DNK
11	Estonia	EST
12	Finland	FIN
13	France	FRA
14	Germany	DEU
15	Greece	GRC
16	Hungary	HUN
17	Iceland	ISL
18	Ireland	IRL
19	Italy	ITA
20	Latvia	LVA
21	Liechtenstein	LIE
22	Lithuania	LTU
23	Luxembourg	LUX
24	Malta	MLT
25	Monaco	MCO
26	Montenegro	MNE
27	Netherlands	NLD
28	North Macedonia	MKD
29	Norway	NOR
30	Poland	POL
31	Portugal	PRT
32	Republic of Moldova	MDA
33	Romania	ROM
34	Russian Federation	RUS
35	San Marino	SMR
36	Serbia	SRB
37	Slovakia	SVK
38	Slovenia	SVN

39	Spain	ESP
40	Sweden	SWE
41	Switzerland	CHE
42	Ukraine	UKR
43	United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland	GBR
44	Australia	AUS
45	Fiji	FJI
46	Kiribati	KIR
47	Marshall Islands	MHL
48	Micronesia	FSM
49	Nauru	NRU
50	New Zaeland	NZL
51	Pulau	PLW
52	Papua New Guinea	PNG
53	Samoa	WSM
54	Solomon Islands	SLB
55	Tonga	TON
56	Tuvalu	TUV
57	Vanuatu	VUT

III.2 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif karena efisiensi waktu dan biaya, mengingat data tersebut sudah tersedia dan tidak perlu dikumpulkan dari awal. Selain itu, data sekunder memberikan akses ke informasi yang lebih luas dari berbagai sumber, memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Data yang digunakan berasal dari indikator berdasarkan UN *E-Government Survey* PBB 2010 hingga 2020 dan *The Worldwide Governance Indicator* (WGI) 2010 hingga 2020 yang bersumber dari website resmi world bank group *www.govindicators.org*. Data selanjutnya diperoleh dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang berkontribusi pada penelitian ini.

III.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

III.3.1 Variabel Independen

1. Pengendalian Korupsi

Korupsi adalah bentuk dari penyelewengan tingkah laku terhadap tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan status dan kekayaan, baik perorangan, keluarga dekat, ataupun kelompok sendiri (Aprilia Retno Sriwijayanti dkk., 2022). Beberapa indikator penting digunakan dalam indeks pengendalian korupsi. Pertama adalah persepsi korupsi, yang mengukur bagaimana masyarakat melihat tingkat korupsi di sektor publik. Kedua adalah transparansi dan akuntabilitas, yang menilai ketersediaan informasi publik dan laporan keuangan pemerintah. Ketiga adalah kualitas layanan publik, yang menilai seberapa efektif dan efisien layanan publik.

2. Hukum dan Peraturan

Elemen kunci dari hukum dan peraturan mencakup keadilan, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, serta proses hukum yang adil. Dengan demikian, hukum dan peraturan menjadi pondasi penting bagi masyarakat yang demokratis dan berkeadilan, menciptakan lingkungan di mana hukum melindungi hak dan kebebasan individu serta menjaga ketertiban sosial.

3. Efektivitas Pemerintah

Efektivitas pemerintah adalah ukuran yang mencerminkan kualitas layanan publik, kapasitas pegawai, dan independensinya yang berasal dari tekanan politik. Pengukurannya dilakukan melalui indikator

seperti efisiensi penyampaian layanan, kompetensi pegawai negeri, dan kemampuan pemerintah dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan. Selain itu, faktor-faktor seperti integritas, transparansi, dan pengelolaan sumber daya juga dinilai. Indikator-indikator ini memberikan gambaran tentang seberapa baik pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat dan berfungsi secara efektif.

4. Suara dan Akuntabilitas

Suara dan akuntabilitas dapat diukur melalui survei kepuasan publik, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta keberadaan mekanisme pengaduan yang efektif. Indikator ini mencakup seberapa bebasnya masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan seberapa responsif pemerintah terhadap aspirasi dan keluhan warga. Selain itu, analisis terhadap kebebasan pers dan keberagaman saluran informasi juga penting untuk menilai seberapa baik suara masyarakat didengar. Pengukuran ini memberikan gambaran tentang seberapa besar masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pemerintahan dan seberapa akuntabel pemerintah dalam menanggapi kebutuhan serta harapan warganya.

5. Modal Manusia

Indeks modal manusia merupakan gabungan dari dua indikator yaitu tingkat literasi orang dewasa dan rasio gabungan pendaftaran kotor sekolah dasar, menengah, dan tinggi. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas publik dalam menggunakan layanan e-partisipasi. Selain itu, terdapat penekanan pada

perlunya pengembangan keterampilan digital di kalangan pegawai pemerintah dan masyarakat agar mereka dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Dengan demikian, modal manusia tidak hanya berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas layanan publik, tetapi juga pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintah.

6. Infrastruktur Telekomunikasi

Indeks infrastruktur telekomunikasi merupakan gabungan dari lima indikator: jumlah komputer pribadi per 100 orang, data yang mencakup jumlah pengguna internet, sambungan telepon, langganan telepon seluler, dan pelanggan pita lebar tetap, semuanya dihitung per 100 orang. Negara dengan infrastruktur telekomunikasi yang kuat cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyediakan layanan e-partisipasi yang efisien dan efektif. Infrastruktur yang baik memungkinkan pemerintah untuk mengimplementasikan sistem informasi yang kompleks dan menyediakan akses yang lebih luas bagi warga negara untuk berinteraksi dengan layanan publik secara online.

III.3.2 Variabel Dependen

E-Partisipasi

Pertanyaan tentang e-partisipasi memperluas survei dengan menekankan kualitas pemerintahan elektronik dalam tahap kehadiran yang terhubung. Pertanyaan-pertanyaan ini berfokus pada penggunaan Internet oleh pemerintah untuk membantu warga mendapatkan informasi ("*e-information sharing*"), berkomunikasi dengan pemangku kepentingan ("*e-concultation*") dan berpartisipasi dalam proses

pengambilan keputusan ("*e-decision making*"). Nilai indeks e-partisipasi suatu negara menunjukkan seberapa berguna fiturnya dan seberapa banyak yang digunakan oleh pemerintahnya dibandingkan dengan negara lain. Tujuan dari pengukuran ini bukanlah untuk mengidentifikasi praktik tertentu. Sebaliknya, ia bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana berbagai negara menggunakan alat daring untuk meningkatkan interaksi antara warganya sendiri, pemerintah, dan satu sama lain demi kepentingan umum.

Tabel 3.2 Pengukuran Variabel

No	Variabel	Pengukuran	Keterangan
1.	Pengendalian Korupsi	Nilai indeks -2,5 sampai 2,5	Nilai pengendalian korupsi yang lebih rendah atau mendekati -2,5 menunjukkan bahwa tingkat pengendalian korupsi di suatu negara sangat rendah, Namun, apabila nilai pengendalian korupsi mendekati 2,5 artinya tingkat pengendaliankorupsi di suatu negara sangat tinggi
2.	Hukum dan Peraturan	Nilai indeks -2,5 sampai 2,5	Ketika nilai hukum dan peraturan mendekati -2,5, itu menunjukkan bahwa pemerintahan negara sangat buruk. Namun, ketika nilai hukum dan peraturan mencapai 2,5 artinya penegakan hukum dan peraturan di negara tersebut baik dan sesuai dengan

			ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
3.	Efektivitas Pemerintah	Nilai indeks -2,5 sampai 2,5	Ketika nilai efektifitas pemerintah mendekati -2,5, pemerintahan negara tersebut sangat buruk. Sebaliknya, ketika nilai efektifitas pemerintah mencapai 2,5 artinya kebijakan pemerintahan negara tersebut lebih efektif.
4.	Suara dan Akuntabilitas	Nilai indeks -2,5 sampai 2,5	Ketika nilai indeks mendekati -2,5 menunjukkan bahwa tingkat kebebasan berekspresi sangat rendah. Sebaliknya, ketika suara dan tanggung jawab mencapai 2,5, negara menjadi lebih terbuka dan dapat menghormati kebebasan berpendapat yang berdampak pada pengambilan keputusan.
5.	Modal Manusia	Indeks modal manusia = 2/3 tingkat literasi orang dewasa + 1/3 rasio gabungan pendaftaran kotor	Indeks orang dewasa digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dan keterampilan orang dewasa dengan berkontribusi sebanyak 2/3 dari total indeks sedangkan indeks pendaftaran bruto menggambarkan akses dan partisipasi dalam pendidikan dengan berkontribusi sebanyak 1/3 dari total indeks.
6.	Infrastruktur Telekomunikasi	Indeks infrastruktur telekomunikasi = Average (indeks komputer pribadi +	Indeks Infrastruktur Telekomunikasi untuk menghitung kualitas infrastruktur telekomunikasi di suatu negara dengan

		Indeks pengguna internet + Indeks saluran telepon + Indeks langganan seluler + Indeks pita lebar tetap)	mengambil rata-rata dari lima komponen: indeks komputer pribadi, indeks pengguna internet, indeks saluran telepon, indeks langganan seluler, dan indeks pita lebar tetap. Indeks ini mencerminkan sejauh mana akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas masyarakat.
7.	E-Partisipasi	Indeks e-partisipasi (negara "x") $= \frac{n\text{ilai terendah} - 0}{\text{nilai tertinggi} - 0}$	Indeks e-partisipasi suatu negara dihitung dengan membandingkan nilai yang diperoleh (nilai terendah) terhadap rentang nilai yang ada (nilai tertinggi dikurangi nilai terendah), sehingga menghasilkan nilai yang menunjukkan sejauh mana partisipasi elektronik negara tersebut dalam konteks tertentu.

III.4 Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data panel yang diterapkan adalah perangkat lunak Stata 17 untuk memudahkan pengolahan data panel. Perangkat lunak ini dianggap sebagai alat analisis yang sesuai untuk tujuan penelitian ini karena pemilihan metode analisis yang tepat sangat krusial untuk menyelesaikan permasalahan penelitian.

Ada beberapa manfaat menggunakan data panel, menurut Widarjono (2018). Regresi ini mengkombinasikan data *cross-section* dengan *time series* memberikan dua alasan. Pertama, data panel dapat memberikan lebih banyak data, sehingga meningkatkan kebebasan. Kedua, menggabungkan data antara *cross-section* dan *time series* sehingga dapat menyelesaikan masalah ketika ada masalah dalam penghilangan variabel. Untuk mengestimasi regresi dengan data panel, metode berikut sering digunakan:

$$Y_{it} = Cons + \beta_1 X_1 it + \beta_2 X_2 it + \beta_3 X_3 it + \beta_4 X_4 it + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e_{it}$$

Keterangan:

Y	: E-Partisipasi (EPT)
X1	: Pengendalian Korupsi (PK)
X2	: Hukum dan Peraturan (HP)
X3	: Efektivitas Pemerintah (EP)
X4	: Suara dan Akuntabilitas (SA)
X5	: Modal Manusia (MM)
X6	: Infrastruktur Telekomunikasi (IT)
i	: Data *cross section* (57 Negara di Eropa dan Oseania)
t	: Data *time series* (tahun 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020)
Cons	: Konstanta
β1, β2, β3, β4, β5, β6	: Koefisien
e	: Residual

III.4.1 Metode Common Effect

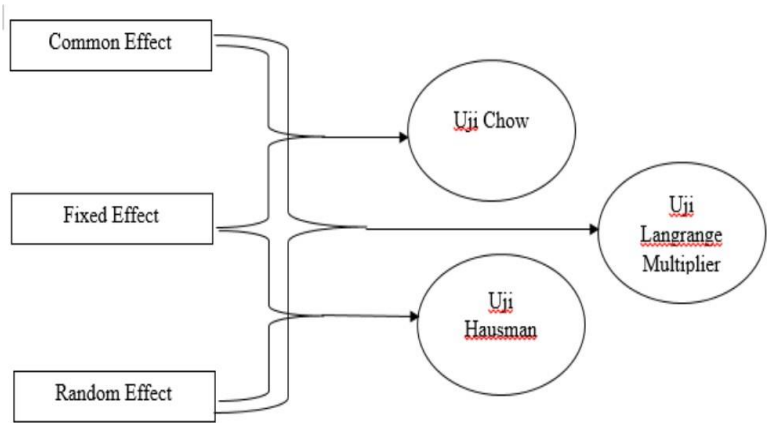
Metode yang paling efektif untuk mengestimasi model regresi data panel adalah menyatukan *cross-section* dan *time series* data dan kemudian melakukan pendugaan. Data ini tidak mempertimbangkan perbedaan antar individu atau waktu ketika digabungkan. Untuk mengestimasi model, digunakan metode OLS (Basuki dan Yuliadi, 2015). Metode ini disebut dengan estimasi efek umum model atau *pooled least square,* dan setiap observasi menerima regresi, sehingga data berukuran satu. Menurut pendekatan ini, nilai *intercept* antara masing-masing variabel setara dengan koefisien slope. Metode ini cukup sederhana. Namun, model ini mungkin menyalahartikan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen di antara unit *cross-section* (Basuki dan Yuliadi, 2015).

III.4.2 Metode Fixed Effect

Metode efek tetap, juga dikenal sebagai efek tetap, adalah teknik analisis data panel yang digunakan untuk mengontrol variabel yang tidak teramati yang tetap dan tidak berubah sepanjang waktu untuk setiap individu atau entitas dalam sampel. Model ini memiliki *intercept* yang berbeda untuk setiap individu, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen serta menghilangkan pengaruh variabel yang tidak teramati yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Meskipun teknik ini dalam banyak kasus dapat memberikan estimasi yang lebih akurat, ia tidak dapat digunakan untuk menganalisis variabel yang tidak berubah sepanjang waktu karena dalam proses estimasi, efek tetap dari variabel tersebut akan dihilangkan.

III.4.3 Metode Random Effect

Model ini akan menganalisis data panel di mana gangguan variabel dapat berinteraksi satu sama lain baik dalam dimensi waktu maupun di antara individu. Istilah kesalahan masing-masing data dalam model efek random mengakomodasi perbedaan *intercept*. Keuntungan menggunakan model *random effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini sering disebut sebagai Model Komponen Kesalahan (*Error Component Model* - ECM) dan Teknik Kuadrat Tergeneralisasi (*Generalized Least Squares* - GLS).



Gambar 3.1 Analisis Data

III.5 Proses Pemilihan Model Dalam Data Panel

Pada model ini, uji Chow digunakan untuk memutuskan memilih antara metode Panel Least Square atau Efek Tetap, dan uji Hausman digunakan untuk memilih antara Efek Tetap atau Efek Sendiri. Proses pengujian data panel adalah sebagai berikut:

III.5.1 Uji Chow

Uji Chow adalah teknik statistik yang sering digunakan dalam analisis regresi sehingga bisa menentukan apakah koefisien regresi dari dua kelompok data berbeda sama atau tidak. Prosesnya dimulai dengan menghitung model regresi untuk masing-masing kelompok secara terpisah, dan kemudian menghitung model regresi untuk kedua kelompok berikutnya. Selanjutnya, Uji Chow melakukan perbandingan jumlah kuadrat kesalahan (SSE) dari kedua model gabungan dan SSE dari masing-masing model. Jika perbedaan antara SSE cukup besar, ini menjelaskan bahwa koefisien regresi antara kelompok-kelompok tersebut berbeda secara signifikan.

Hipotesis nol (H0) mengatakan bahwa tidak ada koefisien regresi yang berbeda antara kedua kelompok. Di sisi lain, hipotesis alternatif mengatakan bahwa tidak ada. (Ha) menunjukkan adanya perbedaan. Nilai p dari uji Chow harus kurang dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, misalnya 0,05. Apabila nilai p lebih besar dari 0,05, H0 ditolak, yang berarti adanya bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa koefisien regresi tidak berbeda secara signifikan antara kelompok tersebut. Sebaliknya, jika nilai p lebih besar dari 0,05, H0 tidak ditolak, yang berarti tidak ada bukti yang cukup dalam menunjukkan perbedaan yang signifikan.

III.5.2 Uji Hausman

Dalam analisis data panel, uji Hausman merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menentukan apakah model regresi yang lebih efisien dan konsisten model efek tetap digunakan dengan lebih tepat daripada model efek acak. Uji ini berfokus pada perbandingan estimasi koefisien dari kedua model untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan. Hipotesis nol (H0)

dalam pengujian hipotesis menyatakan bahwa model efek acak adalah model yang tepat, yang berarti bahwa tidak adanya korelasi antara variabel independen dan efek individual yang tidak teramati. Di sisi lain, hipotesis alternatif (Ha) mengatakan bahwa model efek tetap lebih tepat, yang menunjukkan bahwa ada korelasi antara variabel independen dan efek individual yang tidak teramati.

Nilai p biasanya digunakan untuk menunjukkan hasil Uji Hausman. Apabila nilai p kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, yang memiliki arti bahwa model efek tetap lebih sesuai dan ada bukti yang cukup menjelaskan bahwa model efek acak tidak dapat diandalkan. Sebaliknya, jika nilai p lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak ditolak, yang menunjukkan bahwa model efek acak dapat digunakan.

III.5.3 Uji Breusch Pagan

Uji Breusch-Pagan adalah teknik statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada heteroskedastisitas dalam model regresi. Heteroskedastisitas terjadi ketika adanya varians kesalahan tidak konstan di seluruh rentang nilai variabel independen. Ini dapat menyebabkan kesalahan standar yang tidak akurat dan estimasi koefisien yang tidak akurat. Uji ini dilakukan dengan menganalisis residual dari model regresi yang telah diestimasi. Uji Breusch-Pagan menggunakan variabel independen untuk memprediksi residual kuadrat dari model regresi. Selanjutnya, statistik uji dihitung berdasarkan hasil regresi dan dibandingkan dengan distribusi chi-kuadrat untuk menentukan apakah ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol, yang menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas. Jika hasil uji menunjukkan bahwa nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis chi-kuadrat, maka dapat disimpulkan bahwa ada heteroskedastisitas dalam model, yang

berarti bahwa analitis harus disesuaikan lebih lanjut.Hipotesis berikut digunakan untuk menjalankan pemeriksaan ini:

Nilai p biasanya digunakan untuk menunjukkan hasil dari Uji Breusch-Pagan. Apabila nilai p kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya ada bukti yang cukup untuk mendukung adanya heteroskedastisitas dalam model regresi. Sebaliknya, Apabila nilai p lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak ditolak, yang berarti tidak adanya bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya heteroskedastisitas, dan varians kesalahan dapat dihitung.

III.5.4 Uji Asumsi Klasik Data Panel

Dalam analisis data panel, uji asumsi klasik sangat krusial untuk memastikan bahwa hasil dari model regresi yang digunakan valid dan dapat diandalkan. Berikut ini adalah penjelasan tentang lima asumsi konvensional yang sering diuji dalam data panel:

1. Linearitas: Asumsi ini menjelaskan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel independen dan dependen harus linear. Jika tidak, model regresi yang digunakan mungkin tidak mengidentifikasi pola yang sebenarnya. Untuk menguji linearitas, peneliti dapat menggunakan analisis residual, di mana residual dari model regresi diplot terhadap nilai prediksi. Jika pola residual menunjukkan pola tertentu (misalnya, kurva), ini menunjukkan bahwa hubungan mungkin tidak linear.
2. Normalitas: Normalitas residual penting untuk validitas inferensi statistik, seperti pengujian hipotesis, karena asumsi normalitas mengatakan bahwa nilai residual dari model regresi terdistribusi bersifat normal. Normalitas dapat diuji dengan memeriksa histogram atau plot Q-Q residual. Jika residual tidak

terdistribusi secara normal, mungkin perlu mengubah data atau menggunakan metode estimasi yang berbeda.

3. Autokorelasi: Ini terjadi ketika nilai residual dari model regresi dapat berkorelasi dengan residual pada waktu yang tidak sama. Ini sering terjadi pada rangkaian waktu data dan dapat menyebabkan estimasi koefisien yang tidak akurat. Nilai Durbin-Watson yang mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi, sedangkan nilai yang jauh dari 2 menunjukkan adanya autokorelasi positif dan negative
4. Multikolinearitas: Keadaan di mana dua atau lebih variabel independen dalam model regresi memiliki korelasi yang tinggi antara satu sama lain disebut sebagai multikolinearitas. Ini dapat menyebabkan peningkatan varians kesalahan dan kesulitan dalam mengestimasi koefisien. Cara untuk mengidentifikasi multikolinearitas adalah dengan menggunakan uji Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF untuk suatu variabel lebih besar dari 0,8 menunjukkan bahwa ada multikolinearitas yang signifikan, dan peneliti mungkin harus mempertimbangkan untuk menggabungkan atau menghapus variabel tersebut.
5. Heteroskedastisitas merujuk pada kondisi di mana varians dari nilai residual tidak konsisten di seluruh rentang nilai variabel independen. Situasi ini dapat mengakibatkan estimasi koefisien yang tidak efisien serta kesalahan standar yang bias. Uji Breusch-Pagan dan uji White adalah dua metode yang sering digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas. Apabila heteroskedastisitas teridentifikasi, peneliti dapat mempertimbangkan penggunaan model regresi yang robust atau melakukan transformasi pada

variabel untuk mengatasi masalah tersebut. Sebaliknya, jika tidak terdeteksi, maka heteroskedastisitas dianggap ada.

Dalam konteks pengujian heteroskedastisitas, hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha) dinyatakan sebagai berikut:

Hipotesis Nol (H0): Tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi, yang berarti varians dari residual adalah konstan (homoskedastis). Dengan kata lain, kesalahan model tidak menunjukkan pola yang sistematis ketika diukur terhadap variabel independen.

Hipotesis Alternatif (Ha): Terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi, yang menunjukkan bahwa varians dari nilai residual tidak konstan. Ini berarti bahwa kesalahan model menunjukkan pola yang sistematis dan variansnya bervariasi tergantung pada nilai variabel independen.

Kriteria pengambilan keputusan mendefinisikan:

Jika nilai signifikan < α 0.05 maka H0 tidak diterima atau ditolak

Jika nilai signifikan > α 0.05 maka H0 diterima atau gagal ditolak.

III.5.5 Uji Statistik Analisis Regresi

Metode uji signifikansi digunakan untuk menentukan apakah hasil hipotesis peneliti benar atau salah.

1. Uji Adjusted R^2

Adjusted R2 adalah modifikasi dari R2 yang menghitung jumlah variabel independen dalam model. Sementara R2 menghitung proporsi varians dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, Adjusted R2 memberikan penilaian kualitas model yang lebih baik, terutama dalam kasus di mana ada lebih dari satu variabel independen. Nilai R2 yang disesuaikan berkisar antara 0 dan 1, dan semakin tinggi nilainya, maka semakin baik model

menjelaskan varians data. Namun, jika nilai R2 yang disesuaikan turun ketika variabel baru ditambahkan ke model, ini menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap model.

2. Uji F

Uji F digunakan dalam mengukur signifikansi total model regresi. Dalam uji ini, model regresi yang disarankan dibandingkan dengan model nol, yang tidak memiliki variabel independen. Hipotesis nol (H0) mengatakan bahwa tidak ada pengaruh karena seluruh koefisien regresi variabel independen sama dengan nol; Hipotesis alternatif (H1) mengatakan memiliki pengaruh karena setidaknya satu koefisien regresi tidak sama dengan nol.

Nilai F yang tinggi menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan berpengaruh signifikan, dan nilai p yang terkait dengan uji F (nilai $p < 0,05$) menunjukkan bahwa kita dapat menolak hipotesis nol, yang menunjukkan bahwa model regresi memiliki pengaruh yang signifikan.

3. Uji t

Setiap koefisien regresi model diuji dengan uji t. Uji ini membantu menentukan apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen tertentu terhadap variabel dependen.

Hipotesis nol (H0) menyatakan bahwa koefisien regresi variabel independen sama dengan nol, atau tidak adanya pengaruh. Hipotesis alternatif (H1): Koefisien regresi variabel independen tidak sama dengan nol atau ada pengaruh, dan nilai t yang tinggi menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan. Nilai p yang terkait dengan uji t (nilai $p < 0,05$) menunjukkan bahwa

hipotesis nol dapat ditolak, artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Statistik deskriptif merupakan metode analisis data yang digunakan untuk menggambarkan, menyimpulkan, dan menampilkan karakteristik utama kumpulan data tanpa melakukan inferensi atau generalisasi terhadap populasi yang lebih besar. Metode ini mencakup berbagai ukuran, termasuk ukuran pemusatan (*mean, median, dan modus*) dan ukuran penyebaran (*range, varians, dan standar deviation*), yang membantu peneliti memahami pola, tren, dan distribusi data.

Tabel di bawah ini menyajikan hasil analisis menggunakan statistik deskriptif yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Minimum	Maximum	Standar Deviasi
PK	0,6237134	-1,12	3	0,9913082
HP	0,7054 094	-1,07	2,12	0,8833303
EP	0,5837719	-1,79	2,22	0,9550493
SA	102,3722	-1555	1595	374,186
MM	0,7453029	0	10	0,559765
IT	0,5918161	0	10	0,5662874
EPT	0,5654409	0	10	0,7861171

Sumber: Data diolah menggunakan Stata 17

Jumlah observasi sebanyak 342, yang terdiri dari 57 negara di Eropa dan Oseania, dijelaskan dalam hasil analisis, yang dapat dilihat pada tabel 4.1. Variabel Y atau indeks partisipasi e-partisipasi (EPT) menghasilkan nilai rata-rata sebesar 0,5654409 atau 56,54409% dari sampel 57 negara, nilai tertinggi untuk variabel ini adalah 10% atau 1000%, yang merupakan indeks e-partisipasi tertinggi yang dicatat di

Netherland, New Zaeland pada tahun 2012. Nilai terendah untuk variabel ini adalah 0% yang merupakan indeks e- artisipasi terendah tahun 2012 tercatat di negara Bosnia dan Herzegovina, Russian Federation, Marshall Islands, Nauru, Papua New Guinea, Samoa, dan Tuvalu di tahun 2012 dan 2016. Data ini menunjukkan bahwa standar deviasi e-partisipasi adalah 0,7861171, dan jika dibandingkan dengan rata-rata yang telah ditentukan, variabel EPT memiliki standar deviasi yang lebih besar. Tingginya standar deviasi variable EPT dikomparasikan dengan nilai rata-rata yang telah diperoleh menjelaskan bahwa ada ketidaksamaan yang signifikan dalam tingkat e-partisipasi individu atau kelompok di negara tersebut.

Pengendalian korupsi (PK) menunjukkan nilai rata-rata 0,6237134 atau 62,37134%, yang mengindikasikan indeks transparansi kontrol korupsi rata-rata negara adalah sebesar 62%. Variabel PK memiliki nilai maksimum sebesar 3 atau 300%, yang mengindikasikan bahwa indeks kontrol korupsi adalah 300% dan terdapat di negara Monaco pada tahun 2020. Indeks terendah variabel PK adalah -1,12 atau -112%, yang menunjukkan bahwa indeks kontrol korupsi terendah adalah sebesar -112% yang terdapat di negara Ukraina pada tahun 2012. Data tersebar dengan standar deviasi PK sebesar 0,9913082. Ketidakmerataan dan perbedaan signifikan dalam tingkat korupsi di suatu negara terlihat dari fakta bahwa standar deviasi variabel PK lebih tinggi daripada nilai rata-rata yang diperoleh. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa beberapa negara sangat efektif dalam mengendalikan korupsi, sementara yang lain mungkin mengalami masalah yang serius.

Hukum dan peraturan (HP) menunjukkan nilai rata-rata 0,7054094 atau 70,054094%, yang mencerminkan rata-rata penerapan hukum dan peraturan di 57

negara. Nilai maksimum variabel HP mencapai 2,12 atau 212%, menunjukkan indeks hukum dan peraturan tertinggi yang tercatat di Finlandia pada tahun 2014. Di sisi lain, nilai minimum variabel HP adalah -1,07 atau -107%, yang menunjukkan indeks hukum dan peraturan terendah di Negara Belarus tahun 2010. Dengan standar deviasi sebesar 0,8833303, artinya terdapat ketidakmerataan dan variasi signifikan dalam penerapan hukum. Tingginya nilai standar deviasi variabel HP dibandingkan dengan rata-rata mengindikasikan adanya masalah serius dalam sistem hukum yang perlu diatasi untuk meningkatkan keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.

Efektivitas pemerintah (EP) menunjukkan nilai rata-rata 0,5837719 atau 58,37719%, yang menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas pemerintahan di 57 negara adalah 58%. Nilai tertinggi untuk variabel EP adalah 2,22 atau 222%, yang menunjukkan tingkat efektivitas pemerintahan tertinggi di Finlandia pada tahun 2010. Sebaliknya, nilai terendah variable EP adalah -1,79 atau -179%, yang menunjukkan tingkat efektivitas terendah di negara Marshall Islands pada tahun 2014. Dengan standar deviasi sebesar 0,9550493, terdapat ketidakmerataan dalam distribusi data. Tingginya nilai deviasi variabel EP dibandingkan dengan rata-rata menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam efektivitas pemerintahan, yang menunjukkan perlunya penanganan masalah dalam sistem pemerintahan untuk meningkatkan layanan publik dan pengelolaan sumber daya bagi semua warga negara.

Suara dan Akuntabilitas (SA) menunjukkan nilai rata-rata 102,3722 atau 10237,22%, yang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat suara dan akuntabilitas di 57 negara adalah 102,37%. Nilai tertinggi untuk variabel SA adalah 1595 atau 1595%, yang menunjukkan tingkat suara dan akuntabilitas tertinggi sebesar 1595% di Norwegia

pada tahun 2010. Di sisi lain, nilai terendah variabel SA adalah -1555, atau -1555%, yang menunjukkan tingkat suara dan akuntabilitas terendah di Belarus pada tahun 2010. Data ini tersebar dengan standar deviasi variabel SA sebesar 374,186. Fakta bahwa standar deviasi variabel SA lebih tinggi daripada rata-rata yang diperoleh artinya data ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan dan ketidakmerataan dalam kemampuan individu dan kelompok untuk menyuarakan pendapat serta menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Ini mungkin merupakan indikasi adanya masalah serius dalam sistem demokrasi yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas bagi semua warga negara.

Modal manusia (MM) menunjukkan nilai rata-rata 0,7453029 atau 74,53029%, yang berarti bahwa rata-rata tingkat modal manusia dari 57 negara adalah 74%. Variabel ini memiliki nilai maksimum sebesar 10 atau 1000%, yang menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan tertinggi adalah 1000% di Australia pada tahun 2012. Nilai terendah untuk variable MM adalah 0, yang menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan terendah adalah 0 di negara-negara seperti Monaco, San Marino, Kiribati, Marsa, dan Mauritius. Ini menunjukkan bahwa data variabel MM memiliki variabilitas yang terbatas, karena standar deviasi variabel MM sebesar 0,559765 lebih rendah daripada rata-rata yang diperoleh.

Infrastruktur telekomunikasi (IT) menghasilkan nilai rata-rata 0,5918161 atau 59,18161%, yang berarti bahwa rata-rata tingkat infrastruktur telekomunikasi dari 57 negara adalah 59%. Variabel ini memiliki nilai maksimum sebesar 10 atau 1000%, yang menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan tertinggi adalah 1000% di Liechtenstein pada tahun 2012. Nilai terendah untuk variabel IT adalah 0, yang menunjukkan bahwa

tingkat inklusi keuangan terendah adalah 0 di negara-negara seperti Kiribati dan Nauru. Ini menunjukkan bahwa data IT memiliki variabilitas yang terbatas, karena standar deviasi variabel IT sebesar 0,5662874 lebih rendah daripada rata-rata yang diperoleh.

1V.2 Hasil Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini, terdapat tiga model efek yaitu *common effect, fixed effect,* dan *random effect* yang digunakan untuk mengestimasi regresi data panel. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model akan dianalisis untuk mengidentifikasi model yang paling cocok untuk pengolahan data.

Setelah itu, uji pemilihan model dilakukan untuk memilih model terbaik dari tiga model yang dinilai. Dalam proses pemilihan ini, uji Chow dan Hausman digunakan. Uji Chow membandingkan nilai probabilitas dengan alpha. *Fixed effect model* (FEM) lebih dianjurkan daripada *common effect model* (CEM) jika probabilitasnya tidak lebih dari 0,05. Sebaliknya, *common effect model* lebih tepat digunakan jika probabilitasnya lebih dari 0,05.

Sebagai hasil dari uji Chow, nilai probabilitas uji F adalah 0,2270, lebih besar dari alpha 5% (0,2270 > 0,05), yang menunjukkan bahwa H0 tidak ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa uji Hausman tidak efektif karena penelitian ini menggunakan *common effect model* (CEM).

Random effect model (REM) lebih baik digunakan daripada metode *common effect* (OLS) dengan melakukan uji Lagrange Multiplier (LM). Hasil uji menjelaskan bahwa nilai probabilitas chibar2 sebesar 0,2315 lebih besar dari 0,05. Karena H0 tidak ditolak, *common effect model* (CEM) adalah model yang sesuai untuk diterapkan. Nilai probabilitas yang tinggi menunjukkan perbedaan signifikan antara koefisien estimasi

efek acak dari parameter umum. Hal ini menunjukkan bahwa penjelasan yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti dapat diperoleh dari model efek umum.

Hasil dari uji Chow dan Lagrange Multiplier menunjukkan bahwa model efek umum adalah model yang paling sesuai ntuk digunakan dalam analisis regresi data panel untuk penelitian ini. Selanjutnya, hasil regresi dapat dianalisis dengan menggunakan model tersebut untuk memahami lebih baik bagaimana variabel-variabel yang diteliti berinteraksi satu sama lain.

Tabel 4.2 Hasil Regresi *Common Effect Model (CEM)*

Y	**Coef**	**Std.Err.**	**t**	**P>| t |**
PK	0,1278747	0,1099969	1,16	0,246
HP	-0,1348961	0,1330483	-1,01	0,311
EP	-0,2549769	0,1052795	2,42	0,016
SA	-0,0002232	0,0001163	-1,92	0,056
MM	0,0578478	0,0761011	0,76	0,448
IT	-0,0020533	0,0770577	-0,03	0,979
_Cons	0,412946	0,0849803	4,86	0,000
Adj R-Squared	0,0926	F-Statistic		6,80
Prob (F-statistic)		0,0000		

Merujuk pada hasil analisis yang ditampilkan dalam tabel 4.2 diatas, diperoleh persamaan model sebagai berikut:

EPT = 0,412946 - 0,1278747 PK - 0,1348961 HP + 0,2549769 EP - 0,0002232 SA + 0,0578478 MM - 0,0020533 IT

Hasil persamaan regresi data panel di atas dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Konstanta (*Intercept*)

   Dengan nilai konstanta sebesar 0,412946, artinya jika semua variabel independen (PK, HP, EP, SA, MM, IT) bernilai nol, maka EPT (Y) diperkirakan akan meningkat sebesar 41,2946%.

2. Pengendalian Korupsi (PK)

   Nilai koefisien untuk PK adalah 0,1278747. Jika variabel lainnya tetap konstan, peningkatan PK sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan EPT (Y) sebesar 12,78747%. Sebaliknya, jika PK menurun sebesar 1%, EPT (Y) akan meningkat sebesar 12,78747%.

3. Hukum dan Peraturan (HP)

   Nilai koefisien HP sebesar -0,1348961, jika variabel lain dianggap konstan, peningkatan HP sebesar 1% akan menyebabkan EPT (Y) turun sebesar 13,48961%. Sebaliknya, penurunan HP sebesar 1% akan menyebabkan EPT (Y) meningkat sebesar 13,48961%.

4. Efektivitas Pemerintah (EP)

   Nilai koefisien EP adalah 0,2549769. Jika variabel lain tetap konstan, peningkatan EP sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan EPT (Y) sebesar 25,49769%. Sebaliknya, jika EP menurun sebesar 1%, EPT (Y) akan meningkat sebesar 25,49769%.

5. Suara dan Akuntabilitas (SA)

   Nilai koefisien SA sebesar -0,0002232, jika variabel lain konstan, peningkatan SA sebesar 1% akan menyebabkan EPT (Y) turun sebesar 0,02232%. Sebaliknya, penurunan SA sebesar 1% akan menyebabkan EPT (Y) meningkat sebesar 0,02232%.

6. Modal Manusia (MM)

   Nilai koefisien MM adalah 0,0578478. Jika variabel lain tetap konstan, peningkatan MM sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan EPT (Y) sebesar 5,78478%. Sebaliknya, jika MM menurun sebesar 1%, EPT (Y) akan meningkat sebesar 5,78478%.

7. Infrastruktur Telekomunikasi (IT)

   Nilai koefisien IT sebesar -0,0020533, jika variabel lain konstan, peningkatan IT sebesar 1% akan menyebabkan EPT (Y) turun sebesar 0,20533%. Sebaliknya, penurunan IT sebesar 1% akan menyebabkan EPT (Y) meningkat sebesar 0,20533%.

IV.3 Pengujian Hipotesis

IV.3.1 Uji t (Uji Signifikansi)

Uji signifikansi t memutuskan apakah setiap variabel independen memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen dengan berasumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan.

1. Berdasarkan analisis uji t pada variabel pengendalian korupsi (PK) diperoleh nilai t hitung sebesar 1,16 terdapat pada tabel 4.2 lebih kecil daripada t tabel 1,966966 (1,16 < 1,966966) dan nilai P- Value 0.246 > 0.05. Maka Ha tidak diterima dan H0 diterima artinya variabel PK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel EPT.
2. Berdasarkan analisis uji t pada variabel hukum dan peraturan (HP) diperoleh nilai t hitung sebesar -1,01 terdapat pada tabel 4.2 lebih kecil daripada t tabel 1,966966 (-1.01 < 1,966966) dan P-Value 0.311 > 0.05.

Maka Ha tidak diterima dan H0 diterima artinya variabel HP berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel EPT.

3. Berdasarkan analisis uji t pada variabel efektivitas pemerintah (EP) diperoleh nilai t hitung sebesar 2.42 terdapat pada tabel 4.2 lebih besar daripada t tabel 1,966966 (2.42 > 1,966966) dan nilai P-Value 0.016 < 0.05. Maka H0 tidak diterima dan Ha diterima artinya variabel EP berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel EPT.
4. Berdasarkan analisis uji t pada variabel suara dan akuntabilitas (SA) diperolah nilai t hitung sebesar -1.92 terdapat pada tabel 4.2 lebih kecil daripada t tabel 1,966966 (-1,92 < 1,966966) dan nilai P-Value 0.056 > 0.05. Maka Ha tidak diterima dan H0 diterima artinya variabel SA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel EPT.
5. Berdasarkan analisis uji t pada variabel modal manusia (MM) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,76 terdapat pada tabel 4.2 lebih kecil daripada t tabel 1,966966 (0,76 < 1,966966) dan nilai P-value 0,448 > 0,05. Maka Ha tidak diterima dan H0 diterima artinya variabel MM berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel EPT.
6. Berdasarkan analisis uji t pada variabel infrastruktur telekomunikasi (IT) diperoleh nilai t hitung sebesar -0,03 terdapat pada tabel 4.2 lebih kecil daripada t tabel 1,966966 (-0,03 < 1,966966) dan nilai P-Value 0,979 > 0.05. Maka Ha tidak diterima dan H0 diterima artinya variabel IT berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel EPT.

IV.3.2 Uji F (Kelayakan Model)

Uji kelayakan model, juga dikenal sebagai uji F statistik, bertujuan untuk menentukan apakah model regresi yang digunakan memenuhi syarat kelayakan.

Menurut hasil analisis pada uji *common effect model*, diperoleh nilai F-Statistic sebesar 6,80, yang lebih besar dibandingkan dengan F tabel 2,125672 (6,80 > 2,125672) dan nilai probabilitas F-Statistic sebesar 0,0000 < 0,05. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel pengendalian korupsi (PK), hukum dan peraturan (HP), efektivitas pemerintah (EP), suara dan akuntabilitas (SA), modal manusia (MM), infrastruktur telekomunikasi (IT) **secara layak berpengaruh terhadap e-partisipasi (EPT) yang diambil dari data 57 negara di Eropa dan Oseania** pada perwakilan tahun 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 dan 2020.

IV.3.3 Koefisien Determinasi (R-squared)

Merujuk pada hasil analisis data, koefisien determinasi (R-squared) dengan uji model efek umum, yang ditampilkan pada tabel 1.4, hasil Adj R-squared dalam sebesar 0.0926 atau 9,26%. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa eparticipation (EPT) sebesar 9,26% mampu dijelaskan oleh variabel pengendalian korupsi (PK), hukum dan peraturan (HP), efektivitas pemerintah (EP), suara dan akuntabilitas (SA), modal manusia (MM), infrastruktur telekomunikasi (IT). Sedangkan sisanya 90,74% dijelaskan oleh variabel yang tidak ada dalam model penelitian ini.

IV.4 Pembahasan

IV.4.1 Analisis Pengaruh Pengendalian Korupsi Terhadap E-Partisipasi

Dalam ranah e-partisipasi, meskipun aksesibilitas dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh *platform* elektronik dapat memotivasi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, pengendalian korupsi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap tingkat e-partisipasi. Meskipun e-partisipasi diharapkan dapat memberdayakan warga negara untuk mengambil peran penting dalam proses pemerintahan melalui kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, pengendalian korupsi yang lemah dapat menghambat partisipasi tersebut (Choi, 2014**).**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengendalian korupsi dan e-partisipasi, yang sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya (Zhao & Xu, 2015). Perbedaan ini menunjukkan bahwa konteks, metodologi, dan kerangka waktu yang digunakan dalam studi sebelumnya perlu diperiksa lebih cermat. Penelitian sebelumnya yang berfokus pada sejumlah kecil negara dengan periode waktu yang lebih pendek mungkin tidak mencerminkan hubungan yang lebih luas antara pengendalian korupsi dan e-partisipasi.

Teori penciptaan bersama juga menunjukkan bahwa partisipasi warga negara tidak cukup untuk menghentikan korupsi, dan pengendalian korupsi tidak secara langsung meningkatkan e-partisipasi. Untuk memerangi korupsi di tingkat nasional, diperlukan kerja sama antara berbagai pihak sosial, termasuk pejabat publik dan lembaga antikorupsi (Politik dkk., 2024). Meskipun partisipasi warga negara melalui *platform online* adalah salah satu komponen,

pengendalian korupsi yang efektif tidak selalu menjamin bahwa partisipasi tersebut akan meningkat.

Praktik e-partisipasi di banyak negara, terutama di negara berkembang sering kali terbatas pada komunikasi antara pemerintah dan warga negara, tanpa adanya pengaruh signifikan dari pengendalian korupsi. Akibatnya, warga negara tidak dapat meminta pertanggungjawaban penyedia layanan di organisasi publik. Meskipun e-partisipasi telah menggantikan komunikasi tatap muka dan buletin konvensional, hal ini tidak menjamin bahwa pengendalian korupsi akan meningkatkan partisipasi warga (Blanc, 2020).

Menurut Transparency International, negara-negara seperti Denmark dan Finlandia consistently menduduki peringkat teratas dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI), menunjukkan tingkat korupsi yang sangat rendah.

Namun, meskipun tingkat korupsi rendah, partisipasi masyarakat dalam e-partisipasi tidak selalu meningkat. Misalnya, di Denmark, meskipun ada kepercayaan tinggi terhadap pemerintah, partisipasi dalam platform digital tetap stagnan karena masyarakat merasa sudah cukup terwakili melalui mekanisme tradisional.

Selain itu, kehadiran badan pemantau atau pengawasan warga tidak cukup untuk menjamin bahwa pengendalian korupsi akan meningkatkan e-partisipasi. Bahkan dengan sistem yang transparan, tidak ada jaminan bahwa pendapat warga akan terintegrasi secara signifikan ke dalam layanan akhir (Haug & Mergel, 2021). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengendalian korupsi tidak memiliki dampak langsung terhadap e-partisipasi, dan faktor-faktor lain mungkin lebih berpengaruh dalam mendorong keterlibatan warga negara dalam proses pemerintahan.

Studi ini didukung oleh Waheduzzaman (2024) mengungkap **tidak mendukung** hubungan yang signifikan antara pengendalian korupsi dan e-partisipasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian korupsi yang efektif tidak selalu berdampak pada tingkat e-partisipasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan lingkungan di mana semua orang bekerja sama dan terbuka untuk mengatasi masalah korupsi, tanpa bergantung pada e-partisipasi sebagai satu-satunya solusi. Ini menunjukkan bahwa berbagai elemen lain harus mendukung pengendalian korupsi untuk mendorong warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan.

IV.4.2 Analisis Pengaruh Hukum dan Peraturan Terhadap E-Partisipasi

Meskipun variabel hukum dan peraturan diharapkan dapat meningkatkan e-partisipasi dalam proses pemerintahan digital, ada argumen yang menjelaskan bahwa hukum dan peraturan tidak selalu berdampak besar pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan digital. Batory dan Svensson (2020) menyatakan bahwa meskipun banyak negara di Eropa memiliki kerangka hukum yang mendorong partisipasi publik, pelaksanaan dan pelaksanaan hukum seringkali tidak konsisten. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya pada sistem, yang pada gilirannya mengurangi keinginan mereka untuk berpartisipasi secara elektronik, meskipun secara teoritis mereka berhak.

Di negara seperti Bulgaria, meskipun ada kerangka hukum yang mendukung partisipasi publik, implementasi hukum sering kali tidak konsisten. Menurut laporan dari European Commission, Bulgaria masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, yang mengurangi kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, negara-negara seperti Jerman memiliki hukum yang baik, tetapi partisipasi masyarakat dalam e-partisipasi tetap rendah karena masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak didengar.

Selain itu, karena alasan berikut, temuan penelitian ini **tidak mendukung** hipotesis bahwa hukum dan peraturan tidak memengaruhi e-partisipasi:

Pertama, implementasi hukum yang tidak konsisten menjadi alasan kenapa *rule of law* tidak begitu berpengaruh terhadap e-partisipasi. Batory dan Svensson (2020) menunjukkan bahwa, meskipun banyak negara memiliki kerangka hukum yang mendukung partisipasi publik, implementasi dan kepatuhan terhadap hukum tersebut seringkali tidak konsisten. Ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum dapat menyebabkan masyarakat tidak percaya pada sistem pemerintahan, yang mengurangi keinginan mereka untuk berpartisipasi secara elektronik.

Kedua, budaya politik yang menghambat keterlibatan, tradisi administrasi dan budaya politik suatu negara dapat lebih memengaruhi keterlibatan elektronik daripada hukum itu sendiri. Batory dan Svensson (2020) mengatakan bahwa meskipun ada undang-undang yang mendukung partisipasi publik, kolaborasi dan keterlibatan masyarakat masih jarang terjadi di beberapa

negara, karena budaya politik yang tidak mendukung keterbukaan dan partisipasi.

Ketiga, akses teknologi dan infrastruktur yang buruk dikarenakan masalah teknis dan keterbatasan akses ke *platform* e-partisipasi mungkin lebih mengganggu daripada masalah hukum. Batory dan Svensson (2020) menekankan bahwa, meskipun ada kerangka hukum yang baik, e-partisipasi tidak akan meningkat jika infrastruktur teknologi tidak memadai atau masyarakat tidak memiliki akses yang cukup ke teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa elemen non-hukum dapat berdampak lebih besar pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan digital.

IV.4.3 Analisis Pengaruh Efektivitas Pemerintah Terhadap E-Partisipasi

Hasil penelitian **mendukung** hipotesis bahwa efektivitas pemerintah dengan e-partisipasi memeliki hubungan positif karena alasan berikut:

Pertama, layanan publik yang diberikan oleh pemerintah berhubungan langsung dengan efektifitas pemerintah. Layanan pemerintah responsif akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pada gilirannya, kepercayaan ini mendorong orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses e-partisipasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya sangat memengaruhi e-partisipasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kedua, kebutuhan dan keinginan rakyat biasanya lebih mudah dipenuhi oleh pemerintah yang efektif. Ketika pemerintah mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat masyarakat, hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung e-partisipasi. Masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui *platform* digital karena mereka

merasa suara mereka didengar dan dihargai. Dengan demikian, efektivitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya berkontribusi pada peningkatan e-partisipasi, yang pada gilirannya dapat mendekatkan keterkaitan antara pemerintah dan warganya serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses pemerintahan.

Temuan ini seiring dengan penelitian yang diperoleh oleh Waheduzzaman & Khandaker (2022), yang menjelaskan bahwa efektivitas pemerintah berpengaruh positif terhadap e-partisipasi. Efektivitas pemerintahan dianggap krusial dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan sehingga meningkatkan partisipasi publik melalui e-partisipasi.

IV.4 4 Analisis Pengaruh Suara dan Akuntabilitas Terhadap E-Partisipasi

Temuan dari penelitian ini **tidak mendukung** hipotesis yang mengklaim bahwa suara dan akuntabilitas berpengaruh terhadap e-partisipasi dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, meskipun partisipasi *online* dimaksudkan untuk membuat warga lebih terlibat dalam proses pemerintahan, banyak penelitian menunjukkan bahwa partisipasi *online* seringkali tidak menyediakan saluran yang efektif bagi warga untuk menyuarakan pendapat mereka secara langsung.

Kedua, ada yang berpendapat bahwa e-partisipasi dapat meningkatkan model partisipasi konvensional yang sudah ada, yang sering mengabaikan kelompok yang kurang terwakili. Menurut Harrison dan Sayogo (2014), kelompok yang tidak memiliki akses ke teknologi informasi mungkin terpinggirkan, tetapi orang-orang dengan akses yang lebih baik cenderung berpartisipasi secara elektronik. Dengan demikian, ketidaksetaraan dalam

representasi suara menyebabkan e-partisipasi tidak efektif dalam meningkatkan akuntabilitas.

Ketiga, meskipun suara dan akuntabilitas warga dapat meningkatkan transparansi dan memungkinkan masyarakat untuk melihat bagaimana pemerintah bertindak, hal ini tidak selalu berarti bahwa e-partisipasi meningkat. Waheduzzaman & Khandaker (2022) menemukan bahwa meskipun ada dampak positif antara suara dan akuntabilitas dengan e-partisipasi, peningkatan akuntabilitas tidak secara signifikan meningkatkan kemampuan warga untuk menuntut penyedia layanan publik untuk bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi digital telah meningkat, ada tantangan dalam memberdayakan warga untuk benar-benar memengaruhi keputusan.

Di Italia, meskipun ada banyak saluran untuk menyuarakan pendapat, survei menunjukkan bahwa hanya 30% warga merasa bahwa pemerintah mendengarkan masukan mereka (Eurobarometer).

Di Norwegia, meskipun memiliki sistem demokrasi yang kuat, partisipasi dalam platform digital tetap rendah karena masyarakat merasa bahwa proses pengambilan keputusan tidak transparan.

Dengan demikian, pentingnya suara dan akuntabilitas dalam mendorong e-partisipasi menjadi semakin jelas, karena keduanya berkontribusi pada keterlibatan yang lebih aktif dari masyarakat dalam proses pemerintahan. Hasil dari temuan ini berkaitan dengan temuan yang dilakukan oleh Waheduzzaman & Khandaker (2022) yang memperoleh temuan bahwa suara dan akuntabilitas tidak cukup berpengaruh untuk meningkatkan e-partisipasi.

IV.4.5 Analisis Pengaruh Modal Manusia Terhadap E-Partisipasi

Meskipun keterlibatan aktif warga negara diperlukan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintahan. Namun, terdapat beberapa alasan bahwa modal manusia **tidak mendukung** hubungan terhadap e-partisipasi dalam penelitian ini disebabkan karena:

Pertama, meskipun kekayaan manusia, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman individu, merupakan komponen penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat, komponen lain, seperti infrastruktur teknologi, akses internet, dan kebijakan pemerintah, lebih dominan dalam konteks e-partisipasi.

Kedua, masyarakat mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami dan menggunakan teknologi informasi, yang dapat menghambat mereka untuk berpartisipasi dalam *platform* e-partisipasi meskipun mereka memiliki sumber daya manusia yang luar biasa.

Ketiga, disparitas digital di antara kelompok masyarakat dapat menyebabkan partisipasi yang tidak merata. Individu dengan akses digital yang lebih tinggi cenderung lebih aktif, sementara individu dari kelompok lain terpinggirkan karena kurangnya keterampilan atau akses teknologi.

Di Jerman, meskipun tingkat pendidikan tinggi, laporan menunjukkan bahwa 40% populasi merasa tidak memiliki keterampilan digital yang cukup untuk berpartisipasi dalam e-partisipasi (Digital Economy and Society Index).

Di Prancis, meskipun ada program pendidikan digital, kesenjangan digital masih ada, dengan 15% populasi di daerah pedesaan tidak memiliki akses internet yang memadai.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh temuan Gultom (2024), yang menyatakan bahwa modal manusia memiliki peranan penting, namun terdapat komponen eksternal dan struktural lainnya yang lebih berpengaruh dalam menentukan tingkat e-partisipasi masyarakat.

IV.4 6 Analisis Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi Terhadap E-Partisipasi

Infrastruktur telekomunikasi sering dianggap sebagai komponen penting yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam e-partisipasi. Namun, temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa infrastruktur telekomunikasi **tidak mendukung** hubungan secara signifikan terhadap e-partisipasi. Salah satu alasannya adalah bahwa keberadaan teknologi yang memadai tidak menjamin bahwa masyarakat akan berpartisipasi secara aktif. Meskipun teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat meningkatkan aksesibilitas, partisipasi yang aktif memerlukan lebih dari sekedar infrastruktur yang baik, ia juga membutuhkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk terlibat dalam proses partisipatif (Hidayatullah & Nurmandi, 2022).

Di Australia, meskipun memiliki infrastruktur telekomunikasi yang baik, laporan dari Australian Bureau of Statistics menunjukkan bahwa 25% populasi tidak menggunakan layanan e-government karena kurangnya pemahaman tentang cara mengaksesnya.

Di Selandia Baru, meskipun akses internet tinggi, survei menunjukkan bahwa hanya 30% warga yang aktif menggunakan platform digital untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, menunjukkan bahwa infrastruktur saja tidak cukup untuk mendorong partisipasi.

Faktor-faktor sosial dan budaya juga memengaruhi tingkat partisipasi. Norma sosial, kepercayaan terhadap pemerintah, dan tingkat pendidikan dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam e-partisipasi, yang semuanya dapat mengatasi keterbatasan yang mungkin ditimbulkan oleh infrastruktur telekomunikasi (Hidayatullah & Nurmandi, 2022). Jadi, meskipun infrastruktur telekomunikasi penting, keberhasilan e-partisipasi lebih bergantung pada komponen lain yang mendorong partisipasi masyarakat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Analisis mengenai pengaruh pengendalian korupsi, hukum dan peraturan, efektivitas pemerintah, suara dan akuntabilitas, modal manusia, infrastruktur telekomunikasi terhadap e-partisipasi menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan pada 57 negara yang tercatat di UN *E-Government* PBB dan *The Worldwide Governance Indicator* (WGI) selama periode 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, dan 2020 sebagai berikut:

1. Secara terpisah, variabel independen yang dianalisis adalah:
    a. Pengendalian Korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap e-partisipasi. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengendalian korupsi yang tinggi tidak secara langsung meningkatkan e-partisipasi masyarakat. Ini mungkin karena faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam *platform* digital.
    b. Hukum dan Peraturan tidak berpengaruh signifikan terhadap e-partisipasi. Maknanya, meskipun hukum dan peraturan tidak cukup untuk mendorong orang untuk berpatisipasi secara aktif dalam e-partisipasi mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang *platform* digital yang tersedia.
    c. Efektivitas Pemerintah berpengaruh positif terhadap e-partisipasi. Artinya, semakin baik pemerintah menjalankan tugasnya semakin banyak orang yang terlibat dalam partisipasi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kemudahan mendapatkan informasi karena

tersedianya akses keterlibatan warga negara melalui *platform* daring dalam mengawasi kebijakan pemerintah sehingga lebih efektif dan efisien.

d. Suara dan Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap e-partisipasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki banyak cara untuk menyuarakan pendapat mereka, itu tidak cukup untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam *platform* digital. Ini mungkin karena pemerintah tidak menanggapi masukan yang disampaikan warga negara.

e. Modal Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap e-partisipasi. Ini disebabkan karena faktor lain seperti aksesibilitas teknologi yang lebih baik serta kurangnya kesadaran tentang peluang e-partisipasi lebih penting. Selain itu, mungkin faktor sosial dan psikologis seperti kepercayaan terhadap pemerintah juga berperan penting dalam menentukan apakah individu memilih untuk terlibat dalam e-partisipasi tersebut.

f. Infrastruktur Telekomunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap e-partisipasi. Ini menunjukkan bahwa, meskipun infrastruktur telekomunikasi tersedia, hal itu tidak cukup untuk mendorong e-partisipasi masyarakat. Ini mungkin karena faktor seperti kesadaran masyarakat dan motivasi masyarakat untuk terlibat.

2. Secara simultan, variabel independen yang diujikan yaitu pengendalian korupsi, hukum dan peraturan, efektivitas pemerintah, suara dan akuntabilitas, modal manusia, infrastruktur telekomunikasi berpengaruh signifikan terhadap e-partisipasi yang terdaftar pada UN *E-Government* PBB.

V.2 Saran

Merujuk pada analisis hasil penelitian ini, penulis memiliki beberapa usulan yang ingin disampaikan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Pendalaman analisis variabel yang tidak signifikan karena beberapa variabel independen pada penelitian yang dihasilkan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap e-partisipasi. Penelitian selanjutnya perlu mendalami faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil ini seperti konteks sosial dan budaya yang dapat menghambat partisipasi masyarakat. Dengan melakukan studi kualitatif atau survei mendalam.
2. Pengembangan dan metode pengukuran indikator, karena indikator yang digunakan dalam penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya menunjukkan bagaimana e-partisipasi ini berjalan. Oleh karena itu, penciptaan indikator yang lebih relevan dan teknik pengukuran yang lebih akurat sangat penting. Penelitian lanjutan dapat membangun dan menguji indikator baru yang menggambarkan aspek-aspek e-partisipasi. Penelitian juga dapat mempertimbangkan variabel tambahan yang mungkin berpengaruh, seperti variabel teknologi dan kebijakan pemerintah.

V.3 Implikasi

1. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah berpengaruh positif terhadap e-partisipasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi untuk mendorong partisipasi masyarakat.
2. Pentingnya kesadaran dan edukasi masyarakat, meskipun infrastruktur telekomunikasi tersedia, kesadaran dan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi sangat penting. Program edukasi yang meningkatkan pemahaman

masyarakat tentang e-partisipasi dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan.

3. Diperlukan juga pengembangan program-program yang dapat meningkatkan literasi digital masyarakat, sehingga mereka lebih siap untuk terlibat dalam e-partisipasi dan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Andersen, T. B. (2009). E-Government as an anti-corruption strategy. Information Economics and Policy, 21, 201– 210.

André, P., Enserink, B., Connor, D., & Croal, P. (2006). Public participation: International best practice principles. Special Publication Series, 4.

Anduiza, E., Gallego, A., & Cantijoch, M. (2010). Online political participation in Spain: The impact of traditional and internet resources. *Journal of Information Technology and Politics*, *7*(4), 356–368. https://doi.org/10.1080/19331681003791891

Aprilia Retno Sriwijayanti, Mohammad Dicky Prastino, Shevia Anjelli, & Anang Dony Irawan. (2022). Konsep dan Komitmen Pemberantasan Korupsi. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *2*(2), 227–242. https://doi.org/10.36456/p.v2i2.6911

Arnstein, S. (1969). A Ladder of Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Astria, N. (2019). PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI Nurfajrin Astria Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Angkatan VII Universitas Diponegoro. *Jurnal Inovasi*, *13*(Vol 13 No 1 (2019): Jurnal Inovasi), 1–10.

Bagaskara et al. (2023). Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Kesejahteraan Digital. *Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi)* *9*, *7*, 9–17. https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/inotek/

Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2015). Electronic data processing (SPSS 15 dan Eviews 7). *Yogyakarta: Danisa Media*.

Bertot, J. C., & Jaeger, P. T. (2008). The e-government paradox: Better customer service doesn't necessarily cost less. Government Information Quarterly, 25(2), 149–154.

Blanc, D. L. (2020), E-participation: a quick overview of recent qualitative trends, Department of Economic and Social Affairs, DESA Working Paper No. 163, ST/ESA/2020/DWP/163, New York: United Nations.

Choi, J.W. (2014), E-Government and Corruption: A Cross Country Survey, World Political Science Review, 10(2), 217–236.

Criado, J. I., Sandoval-Almazan, R., & GilGarcia, J. R. (2013). Government innovation through social media. Government Information Quarterly, 30(4), 319–326. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10.003

Dema, H., Astinah, A., & Yusmaeni, Y. (2020). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, *8*(1), 64–70. https://doi.org/10.55678/prj.v8i1.228

Demirhan, K. and Öktem, M.K., 2011. Electronic participation in the policy making process: A case study.International Journal of eBusiness and eGovernment studies,3(1), pp.59-78.

Edelmann, N., Krimmer, R., & Parycek, P. (2008). Engaging youth through deliberative e-participation: A case study. International Journal of Electronic Governance, 1(4), 385–399.

Eisenhardt, K.M. 1989."Agency theory; an assessment and review". Academy of Management Review, 14: 57-74.

Farhan, Y., Bahagijo, S., Suhirman, Susmanto, Rinusu, & Husbani, F. (2007). Memfasilitasi Konsultasi Publik. (R. Djohani & D. Satriana, Eds.). Bandung: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM).

Fitriani, D., Budiyani, Y., Hardika, A. R., & Mita Choerunissa. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial. *ADVANCES in Social Humanities Research*, *1*(4), 362–371. https://adshr.org/index.php/vo/article/view/43

Glass, L. M., Newig, J., & Ruf, S. (2023). MSPs for the SDGs–Assessing the collaborative governance architecture of multi-stakeholder partnerships for implementing the Sustainable Development Goals. *Earth System Governance*, *17*, 100182.

Gulati, GJJ, Williams, CB, & Yates, DJ (Tahun 2014). Prediktor layanan on-line dan e-partisipasi: Sebuah studi lintas negara perbandingan.Informasi Pemerintah Triwulanan Bahasa Indonesia:31(4), 526–533. https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.07.005

Gultom, D. N., Khairina, E., & Salsabila, L. (2024). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas E-Government Dalam Administrasi Publik. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *10*(1), 128–136. https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16516

Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif. In Masyarakat Indonesia.

Harechko, I. (2011). Basic mechanisms of e-participation of citizens in policy-making. Toruńskie Studia Międzynarodowe, 1(4), 21–32.

Harrison, T. M., & Sayogo, D. S. (2014). Transparency, participation, and accountability practices in open government: A comparative study. Government Information Quarterly, 31(4), 513–525

Haug, N. & Mergel, I. (2021), Public Value Co-Creation in Living Labs—Results from Three Case Studies, Administrative Sciences, 11(3), 74–89.

Hidayatullah, N., & Nurmandi, A. (2022). The success of E-Participation in Supporting the development of Smart Cities in Spain, Italy, United States and Germany. *Proceedings of the 8th International Conference on Human Interaction & Emerging Technologies (IHIET 2022): Artificial Intelligence & Future Applications, August 22-24, 2022, Nice, France*, *68*(October). https://doi.org/10.54941/ahfe1002806

Hong, S., & Cho, B. S. (2018). Citizen participation and the redistribution of public goods. *Public Administration*, *96*(3), 481–496. https://doi.org/10.1111/padm.12521

Hsieh, PH, Huang, CS, dan Yen, DC (Tahun 2013). Menilai layanan web di negara-negara berkembang di negara Timur - e-government Taiwan.Informasi Pemerintah TriwulananBahasa Indonesia:30(3), 267– 276. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.02.003

Huraerah, A. (2008). Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat: Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.

Ingrams, A., & Schachter, H. L. (2019). E-participation opportunities and the ambiguous role of corruption: A model of municipal responsiveness to socio-political factors. Public Administration Review, 79(4), 601–611.

Jensen, M. C. and William, H.M.1976. “Theory of the Firm: Managerial behaviour, agency cost and owenership structur”. Journal of Financial Economics, October, 3(4): 305-360.

John, CB, Paul, TJ, dan Derek, H. (Tahun 2011). Dampak kebijakan terhadap penggunaan media sosial pemerintah: Isu, tantangan, dan rekomendasi.Informasi Pemerintah TriwulananBahasa Indonesia:29(1), 30–40. https://doi .org/10.1016/j.giq.2011.04.004

Kalampokis, E., Tambouris, E., & Tarabanis, K. (2008). A Domain Model for eParticipation. 2008 Third International Conference on Internet and Web Applications and Services, 25– 30. https://doi.org/10.1109/ICIW.2008.69

Kardan, AA, Sadeghiani, A., 2011. Apakah e-government merupakan jalan menuju e-demokrasi? studi longitudinal situasi Iran. Gov. Inf. Q. 28 (4), 466–473.https://doi.org/10.1016/ j.giq.2010.12.007.

Kim, S., Kim, H. J., & Lee, H. (2009). An institutional analysis of an e-government system for anti-corruption: The case of OPEN. *Government information quarterly*, *26*(1), 42-50.

Kneuer, M., & Harnisch, S. (2016). Diffusion of e-government and e-participation in Democracies and Autocracies. Global Policy, 7(4), 548–556.

Komito, L., & Komito, L. (2016). E-Participation and Governance : Widening the Net e-Participation and Governance : Widening the net. *Electronic Journal of E-Government*, *3*(March), 39–48. http://www.ejeg.com/volume-3/vol3-iss1/v3-i1-art4-abstract.htm

Law, K. H., & Lau, G. T. (2006). E-Rulemaking: Needs from ICT Perspectives. ERulemaking at the Crossroads, 11.

Lee, J., & Kim, S. (2018). Citizens' e-participation on agenda setting in local governance: Do individual social capital and e-participation management matter? Public Management Review, 20(6), 873–895.

Leible, S., Ludzay, M., Götz, S., Kaufmann, T., Meyer-Lüters, K., & Tran, M. N. (2022). ICT Application Types and Equality of E-Participation - A Systematic Literature Review. *PACIS 2022 Proceedings*, *July*, 0–17. https://aisel.aisnet.org/pacis2022/30

Lombardi, P., Huovila, P. and Sunikka-Blank, M., 2010. The potential of e-participation in sustainable development evaluation: Evidence from case studies. InPolitics, Democracy and E-Government: Participation and Service Delivery(pp. 1-16). IGI global.USA

Macintosh, A. (2004). *Macintosh - Characterizing e-participation in policy making.pdf*. *00*(C), 1–10. https://doi.org/10.1109/HICSS.2004.1265300

Mahmood, R. 2004. Can Information and Communication Technology Help Reduce Corruption? How so and Why not: Two Case Studies from South Asia. Perspectives on Global Development and Technology 3(3): 347–373.

Meijer, A. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. International Review of Administrative Sciences, 82(2), 392–408.

Mergel, I. (2014). Social media adoption: Toward a representative, responsive or interactive government? *ACM International Conference Proceeding Series*, 163–170. https://doi.org/10.1145/2612733.2612740

Mokobombang, W., Syafaruddin, S., Syafaruddin, A. R. A., Khaeriyah, K., & Natsir, N. (2023). Dampak Perubahan Layanan Publik Yang Disebabkan Oleh Teknologi Dan Media Sosial. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, *4*(1), 348–359. https://doi.org/10.32585/jbfe.v4i1.4180

Politik, M. J., Humaniora, H., Winata, G. N., & Lampung, U. B. (2024). *Tindak Pidana Korupsi : Tantangan dalam Penegakan dan Pencegahannya*. *2*.

Puspitasari, P. (2017). *Deduksi Model Kesuksesan Sistem Informasi*. 148–157.

Riskiyono, J. (2015). Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity. *Aspirasi*, *6*(2), 159–176. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511

Saebo, O., Rose, J., & Flak, L. S. (2008). The shape of e-participation: Characterizing an emerging research area. Government Information Quarterly, 25, 400–428.

Samsor, A. M. (2021). Challenges and Prospects of e-Government implementation in Afghanistan. *International Trade, Politics and Development*, *5*(1), 51-70.

Sarjito, A. (2023). Dampak Digitalisasi Administrasi Perdesaan di Negara Berkembang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *13*(2), 106–124. https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.3814

Sawir, M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi. books.google.com. http://repository.uniyap.ac.id/239/1/Birok rasi Pelayanan Publik.pdf

Schneider, H., & Libercier, M.-H. (1995). Participatory Development from Advocacy to Action. Paris: OECD.

Setiorini,MM., A. (2018). Pengelolaan Modal Manusia Dalam Kaitannya Dengan Manajemen

Kinerja. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana, 6*(1), 48–57. https://doi.org/10.35137/jmbk.v6i1.173

Shahraki, Mahdi, and Simin Ghaderi. 2021. "The Impact of Public Health Expenditures and the Quality of Democracy on Social Welfare in Countries with High Human Development Index." 1:1–4.

Shulman, S. W., Schlosberg, D., Zavestoski, S., Courard-hauri, D., & Courard-hauri, D. (1987). Social Science Computer Review. *Social Science Computer Review*, *5*(4), 608. https://doi.org/10.1177/089443938700500420

Sivarajah, U., Weerakkody, V., Waller, P., Lee, H., Irani, Z., Choi, Y., ... & Glikman, Y. (2016). The role of e-participation and open data in evidence-based policy decision making in local government. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, *26*(1-2), 64-79.

Suherlan, S., 2023. Digital Technology Transformation in Enhancing Public Participation in Democratic Processes.Technology and Society Perspectives (TACIT),1(1), pp.10-17.

Tai, K., Porumbescu, G., & Shon, J. (Tahun 2020). Dapatkah e-partisipasi merangsang partisipasi warga secara luring: Sebuah uji empiris dengan implikasi praktis.Tinjauan Manajemen PublikBahasa Indonesia:22(2), 278–296. https://doi.org/10.1080/14719037.2019. 1584233

Tyas, D. L., Budiyanto, A. D., & Susanto, A. J. (2019). Scientific Journal of Informatics Editorial Team Editor-in-Chief. *Scientific Journal of Informatics*, *2*(2).

UNDESA. (2014). United Nations E-Government Survey 2014. New York.

Verba, S., Schlozman, K.L. and Brady, H.E., 1995.Voice and equality: Civic voluntarism in American politics. Harvard University Press.Cambridge

Waheduzzaman, W. (2024). *Mengungkap Hubungan Antara Partisipasi Elektronik dan Pengendalian Korupsi : Wawasan dari Kerangka Kerja Penciptaan Bersama Kata kunci : Akuntabilitas ; Teori Penciptaan Bersama ; Tata Kelola ; Partisipasi ; Transparansi*. *48*(3).

Waheduzzaman, W., & Khandaker, S. (2022). E-participation for combating corruption, increasing voice and accountability, and developing government effectiveness: A cross-

country data analysis. *Australian Journal of Public Administration*, *81*(4), 549–568. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12544

Walsh, L. (2007). A case study of Public servants Engaged in E-consultation in Australia. International Journal of Electronic Government Research, 3(4), 20–37.

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya disertai panduan eviews* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Williams, M. F. (2009). Understanding public policy development as a technological process. Journal of Business and Technical Communication, 23(4), 448–462.

Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Rösch, M. (2018). Open government and open data: An inside perspective. International Review of Administrative Sciences, 84(1), 31–52.

Yang, T. M., & Maxwell, T. A. (2011). Information-sharing in public organizations: A literature review of interpersonal, intra-organizational and inter-organizational success factors. Government Information Quarterly.

Zhao, X., & Xu, H. D. (2015). E-government and corruption: A longitudinal analysis of countries. International Journal of Public Administration, 38(6), 410–421.

Zheng, Y. (2016). The impact of E-participation on corruption: A cross-country analysis. International Review of Public Administration, 21(2), 91–103.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar negara yang menjadi sampel penelitian

No	Negara	Kode
1	Albania	ALB
2	Andorra	ADO
3	Austria	AUT
4	Belarus	BLR
5	Belgium	BEL
6	Bosnia and Harzegovina	BIH
7	Bulgaria	BGR
8	Croatia	HRV
9	Czech Republic	CZE
10	Denmark	DNK
11	Estonia	EST
12	Finland	FIN
13	France	FRA
14	Germany	DEU
15	Greece	GRC
16	Hungary	HUN
17	Iceland	ISL
18	Ireland	IRL
19	Italy	ITA
20	Latvia	LVA
21	Liechtenstein	LIE
22	Lithuania	LTU
23	Luxembourg	LUX
24	Malta	MLT
25	Monaco	MCO
26	Montenegro	MNE
27	Netherlands	NLD
28	North Macedonia	MKD
29	Norway	NOR
30	Poland	POL
31	Portugal	PRT
32	Republic of Moldova	MDA
33	Romania	ROM
34	Russian Federation	RUS
35	San Marino	SMR
36	Serbia	SRB
37	Slovakia	SVK
38	Slovenia	SVN
39	Spain	ESP
40	Sweden	SWE
41	Switzerland	CHE
42	Ukraine	UKR

43	United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland	GBR
44	Australia	AUS
45	Fiji	FJI
46	Kiribati	KIR
47	Marshall Islands	MHL
48	Micronesia	FSM
49	Nauru	NRU
50	New Zaeland	NZL
51	Pulau	PLW
52	Papua New Guinea	PNG
53	Samoa	WSM
54	Solomon Islands	SLB
55	Tonga	TON
56	Tuvalu	TUV
57	Vanuatu	VUT

Lampiran 2 : Index Variabel PK, HP, EP, SA, MM, IT, EPT

No	Negara	Tahun	PK	HP	EP	SA	MM	IT	EPT
1	Albania	2010	-0,53	-0,39	-0,28	124	0,2924	0,1629	0,1286
		2012	-0,78	-0,52	-0,27	0,02	0,7863	0,337	0,1053
		2014	-0,59	-0,31	-0,05	0,14	0,71	0,3548	0,5294
		2016	-0,45	-0,30	0,06	0,17	0,652	0,353	0,6441
		2018	-0,52	-0,40	0,11	0,18	0,7877	0,4318	0,7584
		2020	-0,55	-0,35	-0,12	0,09	0,8001	0,5785	0,8452
2	Andora	2010	1,3	1,2	1,51	1324	0,2903	0,4415	0,1429
		2012	1,26	1,4	1,52	1,43	0,8063	0,7315	0,1579
		2014	1,22	1,64	1,71	1,17	0,7277	0,7671	0,4314
		2016	1,22	1,57	1,85	1,18	0,6978	0,6855	0,4407
		2018	1,23	1,60	1,94	1,04	0,7309	0,722	0,5674
		2020	1,31	1,69	1,82	1,09	0,7448	0,8372	0,5119
3	Austria	2010	1,6	1,8	1,81	1,43	0,3167	0,5736	0,5
		2012	1,43	1,86	1,56	1,45	0,9091	0,6977	0,3684
		2014	1,47	1,94	1,55	1,39	0,866	0,7597	0,6275
		2016	1,53	1,79	1,50	1,34	0,8396	0,7098	0,8814
		2018	1,60	1,89	1,49	1,39	0,8505	0,7716	0,8258
		2020	1,51	1,80	1,65	1,40	0,9032	0,824	0,9762
4	Belarus	2010	-0,63	-1,07	-1,19	-1555	0,3188	0,2081	0,2429
		2012	-0,46	-0,92	-0,97	-1,57	0,912	0,5033	0,0789
		2014	-0,23	-0,82	-0,48	-1,44	0,8861	0,6069	0,3529
		2016	-0,20	-0,75	-0,47	-1,34	0,8716	0,6304	0,5593
		2018	-0,13	-0,88	-0,26	-1,37	0,8681	0,6881	0,882
		2020	-0,11	-1,05	-0,80	-1,45	0,8912	0,8281	0,75

5	Belgium	2010	1,47	1,42	1,65	1361	0,3218	0,5698	0,5857
		2012	1,56	1,45	1,67	1,35	0,9264	0,742	0,1316
		2014	1,51	1,55	1,52	1,37	0,8932	0,6988	0,6275
		2016	1,57	1,42	1,43	1,38	0,9712	0,6808	0,6441
		2018	1,46	1,37	1,26	1,32	0,974	0,693	0,7584
		2020	1,48	1,36	1,12	1,28	0,9521	0,8033	0,6548
6	Bosnia n Herzegovina	2010	-0,34	-0,36	-0,74	-82	0,2932	0,2505	0,0429
		2012	-0,31	-0,2	-0,45	-0,1	0,8341	0,3917	0
		2014	-0,3	-0,13	-0,49	-0,07	0,7288	0,3998	0,235
		2016	-0,46	-0,17	-0,41	-0,13	0,6815	0,4047	0,5085
		2018	-0,58	-0,21	-0,64	-0,27	0,7217	0,4385	0,4326
		2020	-0,62	-0,29	-1,04	-0,32	0,7468	0,6295	0,6071
7	Bulgaria	2010	-0,24	-0,1	-0,07	531	0,3086	0,337	0,3
		2012	-0,28	-0,12	-0,03	0,4	0,8486	0,5006	0,0263
		2014	-0,3	-0,08	-0,11	0,37	0,796	0,5941	0,2549
		2016	-0,24	-0,12	0,12	0,40	0,7875	0,5602	0,6949
		2018	-0,16	-0,09	0,14	0,36	0,8106	0,5785	0,8708
		2020	-0,30	-0,11	-0,18	0,26	0,8408	0,7826	0,8929
8	Croatia	2010	0,02	0,08	0,59	476	0,303	0,422	0,4571
		2012	-0,03	0,15	0,68	0,54	0,8615	0,6965	0,2895
		2014	0,2	0,22	0,68	0,51	0,7928	0,6271	0,3333
		2016	0,18	0,36	0,45	0,53	0,805	0,5974	0,7797
		2018	0,07	0,32	0,55	0,44	0,8196	0,6051	0,7697
		2020	0,20	0,26	0,46	0,58	0,8414	0,7293	0,8929
9	Czech Republic	2010	0,38	0,93	0,91	1015	0,3112	0,4258	0,4857
		2012	0,31	1,02	0,93	0,97	0,8898	0,5151	0,2632
		2014	0,43	1,14	1,03	1,03	0,8755	0,5753	0,2549
		2016	0,59	1,01	1,04	1,03	0,8627	0,5952	0,5593
		2018	0,54	1,05	0,98	0,81	0,8752	0,5971	0,618
		2020	0,58	1,05	0,95	0,98	0,903	0,814	0,7262
10	Denmark	2010	2,35	1,9	2,1	1542	0,3278	0,6988	0,6429
		2012	2,38	1,88	1,99	1,67	0,9489	0,8615	0,5526
		2014	2,25	1,91	1,85	1,54	0,953	0,8247	0,8136
		2016	2,27	1,85	1,88	1,52	0,9588	0,9979	0,9643
		2018	2,19	1,81	1,84	1,56	0,9472	0,7978	1
		2020	2,27	1,85	1,88	1,52	0,9588	0,9979	0,9643
11	Estonia	2010	0,99	1,15	1,08	1106	0,319	0,6273	0,6857
		2012	1,09	1,15	0,95	1,11	0,9085	0,6642	0,7632
		2014	1,3	1,37	1,01	1,17	0,8889	0,7934	0,7647
		2016	1,27	1,22	1,09	1,21	0,8761	0,7329	0,8136
		2018	1,50	1,23	1,18	1,18	0,8818	0,7613	0,9101
		2020	1,61	1,37	1,33	1,17	0,9266	0,9212	1

12	Finland	2010	2,15	1,96	2,22	1487	0,3278	0,624	0,4143
		2012	2,23	1,94	2,21	1,6	0,9467	0,7225	0,7368
		2014	2,16	2,12	2,03	1,54	0,9037	0,8594	0,7059
		2016	2,23	2,04	1,87	1,53	0,944	0,759	0,9153
		2018	2,21	2,07	2,05	1,58	0,9509	0,7284	1
		2020	2,20	2,07	1,94	1,61	0,9549	0,9101	0,9524
13	France	2010	1,49	1,5	1,46	1203	0,3225	0,5954	0,6
		2012	1,47	1,44	1,37	1,24	0,9244	0,7902	0,5789
		2014	1,29	1,45	1,41	1,22	0,8812	0,8003	0,9608
		2016	1,36	1,38	1,41	1,14	0,8445	0,7502	0,8983
		2018	1,31	1,43	1,45	1,15	0,8598	0,7979	0,9663
		2020	1,15	1,32	1,24	1,07	0,8612	0,8719	0,9048
14	Germany	2010	1,77	1,64	1,52	1298	0,3146	0,6955	0,6143
		2012	1,82	1,67	1,53	1,39	0,8971	0,775	0,7632
		2014	1,81	1,85	1,67	1,44	0,8862	0,8038	0,7059
		2016	1,82	1,61	1,69	1,36	0,8882	0,7342	0,7627
		2018	1,93	1,62	1,56	1,43	0,9036	0,7952	0,9213
		2020	1,86	1,55	1,35	1,38	0,9362	0,8856	0,75
15	Greece	2010	-0,06	0,58	0,49	898	0,3235	0,3829	0,2571
		2012	-0,19	0,39	0,28	0,7	0,9332	0,5531	0,3421
		2014	-0,14	0,37	0,3	0,62	0,8741	0,6549	0,8039
		2016	-0,11	0,13	0,16	0,67	0,8901	0,6032	0,6102
		2018	-0,03	0,13	0,29	0,73	0,8867	0,6439	0,8764
		2020	0,06	0,32	0,44	0,97	0,8905	0,81	0,7857
16	Hungary	2010	0,3	0,77	0,65	894	0,3167	0,4338	0,3143
		2012	0,3	0,61	0,62	0,75	0,9065	0,5677	0,4474
		2014	0,16	0,51	0,59	0,55	0,8668	0,5654	0,4510
		2016	0,10	0,43	0,50	0,40	0,8317	0,5615	0,4915
		2018	0,08	0,58	0,49	0,48	0,8364	0,6071	0,7079
		2020	0,09	0,51	0,57	0,39	0,8509	0,7255	0,6786
17	Iceland	2010	1,93	1,71	1,58	1446	0,3238	0,6395	0,4143
		2012	1,88	1,68	1,48	1,44	0,931	0,8772	0,1579
		2014	1,82	1,7	1,49	1,36	0,9178	0,8591	0,4902
		2016	1,94	1,51	1,38	1,36	0,894	0,7814	0,661
		2018	1,84	1,71	1,46	1,38	0,9365	0,8292	0,6854
		2020	1,70	1,79	1,51	1,39	0,9525	0,9838	0,7738
18	Ireland	2010	1,68	1,76	1,34	1324	0,3277	0,5739	0,4429
		2012	1,46	1,73	1,54	1,32	0,9535	0,6553	0,1316
		2014	1,69	1,76	1,6	1,32	0,9619	0,7039	0,6471
		2016	1,69	1,49	1,36	1,29	0,9218	0,6602	0,7119
		2018	1,57	1,44	1,41	1,28	0,9626	0,697	0,9326
		2020	1,56	1,49	1,47	1,39	0,9494	0,81	0,8571

19	Italy	2010	0,28	0,45	0,47	963	0,3196	0,4914	0,2143
		2012	0,17	0,43	0,45	0,92	0,912	0,6859	0,2632
		2014	0,01	0,42	0,47	1	0,8552	0,6747	0,7843
		2016	0,11	0,39	0,58	1,03	0,8126	0,6469	0,9153
		2018	0,24	0,26	0,44	0,95	0,8341	0,6771	0,9551
		2020	0,54	0,24	0,39	1,06	0,8466	0,7932	0,8214
20	Latvia	2010	0,2	0,76	0,73	794	0,3171	0,3762	0,2714
		2012	0,24	0,78	0,83	0,78	0,8879	0,5051	0,2105
		2014	0,41	0,87	0,95	0,85	0,8288	0,6237	0,7059
		2016	0,43	0,95	1,00	0,84	0,8512	0,5831	0,5254
		2018	0,32	0,95	1,04	0,78	0,8132	0,6188	0,6854
		2020	0,72	0,95	0,87	0,87	0,9172	0,8399	0,5833
21	Liechtenstein	2010	1,84	1,62	1,78	1587	0,3127	0,5412	0,5238
		2012	1,79	1,59	1,78	1,51	0,891	10	0,2368
		2014	2,08	1,74	1,7	1,4	0,8361	0,7468	0,2745
		2016	2,04	1,68	1,70	1,25	0,7978	0,7293	0,6271
		2018	2,00	1,67	1,73	1,29	0,8237	0,8389	0,7472
		2020	2,00	1,75	1,81	1,26	0,8489	1	0,6071
22	Lithuania	2010	0,37	0,78	0,74	916	0,3198	0,4413	0,5286
		2012	0,39	0,84	0,83	0,93	0,924	0,5765	0,5263
		2014	0,55	0,94	0,98	0,96	0,8557	0,5697	0,6471
		2016	0,71	1,02	1,07	1,00	0,8717	0,6262	0,8305
		2018	0,49	0,95	1,07	0,89	0,8323	0,6293	0,8034
		2020	0,80	0,99	1,05	1,01	0,9218	0,8249	0,7381
23	Luxembourg	2010	2,04	1,84	1,72	1575	0,3021	0,7138	0,1714
		2012	2,11	1,79	1,66	1,65	0,8404	0,8644	0,3947
		2014	2,07	1,9	1,65	1,55	0,783	0,8723	0,5490
		2016	2,09	1,75	1,69	1,50	0,775	0,819	0,6949
		2018	2,08	1,80	1,77	1,53	0,7803	0,7964	0,9382
		2020	2,06	1,78	1,83	1,50	0,8097	0,9072	0,7024
24	Malta	2010	0,78	1,41	1,19	1167	0,2927	0,4863	0,3429
		2012	0,94	1,34	1,24	1,17	0,8057	0,7192	0,2632
		2014	0,85	1,19	1,02	1,18	0,7855	0,7683	0,4706
		2016	0,72	0,99	0,95	1,20	0,731	0,6992	0,7797
		2018	0,58	1,05	0,96	1,09	0,7973	0,7657	0,8483
		2020	0,37	0,91	1,03	1,12	0,829	0,9232	0,8333
25	Monaco	2010	0	0,88	0	1024	0	0,6961	0,1365
		2012	0	0	0	0,8	0,9439	0,937	0,1842
		2014	0	0	0	0,99	0,794	0,1	0,0980
		2016	0	0	0	0,84	0,8757	0,1	0,2881
		2018	0	0	0	0,63	0,7901	0,1	0,5618
		2020	3	0	0	0,68	0,8187	0,8639	0,369

26	Montenegro	2010	-0,25	-0,06	0,13	190	0,294	0,3311	0,1571
		2012	-0,13	-0,06	0,12	0,22	0,8182	0,5375	0,6053
		2014	-0,08	0,01	0,29	0,16	0,8279	0,5481	0,5882
		2016	-0,05	-0,12	0,17	0,08	0,8165	0,5221	0,8305
		2018	0,01	0,02	0,12	0,05	0,8172	0,6059	0,7416
		2020	-0,02	-0,01	-0,07	0,04	0,8239	0,7366	0,5476
27	Netherlands	2010	2,09	1,81	1,77	1451	0,3257	0,7666	0,6
		2012	2,09	1,85	1,84	1,61	0,9425	0,8342	10
		2014	1,96	1,97	1,84	1,55	0,9224	0,8175	0,10000
		2016	1,90	1,88	1,85	1,54	0,9183	0,7517	0,9492
		2018	1,92	1,78	1,84	1,49	0,9206	0,7758	0,9888
		2020	2,03	1,75	1,84	1,52	0,9349	0,9276	0,9643
28	North Macedonia	2010	-0,09	-0,3	-0,19	115	0,2916	0,3804	0,2143
		2012	-0,05	-0,25	-0,22	-0,03	0,9347	0,787	0,6842
		2014	-0,03	-0,06	0,02	-0,14	0,938	0,8133	0,6863
		2016	-0,27	-0,33	0,00	-0,23	0,9031	0,7276	0,7627
		2018	-0,37	-0,29	0,09	-0,03	0,9025	0,7131	0,9775
		2020	-0,47	-0,08	0,06	0,06	0,7395	0,6442	0,8333
29	Norway	2010	2,08	1,89	1,87	1595	0,3262	0,683	0,5
		2012	2,25	1,95	1,9	1,73	0,9044	0,4921	0,1842
		2014	2,22	2,02	1,82	1,68	0,8396	0,5618	0,4902
		2016	2,19	2,03	1,86	1,66	0,8747	0,5857	0,8814
		2018	2,09	1,96	1,88	1,70	0,8668	0,5805	0,8933
		2020	2,10	1,97	1,93	1,72	0,9392	0,9034	0,9048
30	Poland	2010	0,51	0,71	0,63	1038	0,3152	0,3374	0,2429
		2012	0,66	0,82	0,66	1,06	0,8931	0,6028	0,3684
		2014	0,68	0,87	0,77	1,11	0,8227	0,6094	0,6471
		2016	0,79	0,62	0,68	0,84	0,8129	0,5838	0,661
		2018	0,65	0,40	0,58	0,70	0,817	0,6617	0,8989
		2020	0,65	0,53	0,36	0,62	0,9001	0,8005	0,9643
31	Portugal	2010	1,06	1,03	0,98	1107	0,3088	0,4189	0,2714
		2012	0,96	1,04	1	1,03	0,8129	0,3586	0,3947
		2014	0,91	1,12	0,98	1,11	0,7201	0,4236	0,6275
		2016	0,89	1,07	1,18	1,16	0,7191	0,485	0,661
		2018	0,84	1,14	1,21	1,17	0,7274	0,4787	0,8596
		2020	0,75	1,18	1,02	1,26	0,8463	0,7948	0,8214
32	Republic of Moldova	2010	-0,67	-0,36	-0,66	-0,06	0,297	0,1933	0,2
		2012	-0,61	-0,32	-0,56	-0,03	0,8783	0,4232	0,0789
		2014	-0,85	-0,24	-0,41	0,01	0,81	0,4385	0,4706
		2016	-0,96	-0,50	-0,63	-0,01	0,7736	0,4533	0,6271
		2018	-0,73	-0,42	-0,47	-0,12	0,7944	0,5471	0,7079
		2020	-0,55	-0,47	-0,51	-0,04	0,7432	0,5683	0,7619

33	Romania	2010	-0,35	0,11	-0,12	432	0,3045	0,3093	0,1857
		2012	-0,38	0,09	-0,17	0,32	0,885	0,6583	0,6579
		2014	-0,22	0,24	0,23	0,43	0,8388	0,6413	0,6863
		2016	-0,15	0,47	-0,04	0,54	0,8234	0,6091	0,7458
		2018	-0,20	0,39	-0,15	0,52	0,8522	0,6219	0,9213
		2020	-0,07	0,39	-0,26	0,59	0,7995	0,7586	0,8095
34	Russian Federation	2010	-1,1	-0,8	-0,6	-889	0,3101	0,2765	0,1714
		2012	-1,05	-0,86	-0,53	-0,98	0,9179	0,6794	0
		2014	-0,92	-0,77	-0,19	-1,04	0,8354	0,6358	0,1961
		2016	-0,82	-0,83	-0,29	-1,13	0,7999	0,6128	0,1356
		2018	-0,85	-0,82	-0,06	-1,07	0,8102	0,7075	0,2584
		2020	-0,91	-0,79	-0,08	-1,07	0,8833	0,7723	0,869
35	San Marino	2010	0	0,88	0	1166	0	0,533	0,1841
		2012	0	0	0	1,21	0,8484	0,4701	0,2368
		2014	0	0	0	1,17	0,7796	0,4681	0,4118
		2016	0	0	0	1,19	0,7769	0,5434	0,8305
		2018	0	0	0	1,11	0,7896	0,6208	0,8146
		2020	0	0	0	1,12	0,7549	0,8153	0,3095
36	Serbia	2010	-0,32	-0,43	-0,08	286	0,294	0,2695	0,2222
		2012	-0,36	-0,33	-0,18	0,2	0,8696	0,5147	0,1316
		2014	-0,25	-0,09	0	0,21	0,8265	0,5296	0,6275
		2016	-0,36	-0,11	-0,01	0,20	0,7822	0,5504	0,5424
		2018	-0,37	-0,15	0,11	-0,02	0,8141	0,5964	0,809
		2020	-0,43	-0,10	-0,01	-0,12	0,828	0,62	0,8214
37	Slovakia	2010	0,25	0,56	0,78	0,91	0,3072	0,4212	0,346
		2012	0,07	0,49	0,78	0,97	0,93	0,6509	0,2105
		2014	0,12	0,49	0,79	0,96	0,9072	0,6193	0,3922
		2016	0,18	0,62	0,83	0,96	0,8952	0,5877	0,7288
		2018	0,26	0,50	0,61	0,84	0,8923	0,6232	0,8146
		2020	0,44	0,67	0,54	0,88	0,8286	0,7988	0,7024
38	Slovenia	2010	0,92	1	1,02	1049	0,3224	0,5026	0,5143
		2012	0,83	1,01	1,02	1	0,9409	0,6318	0,5
		2014	0,72	1	1	0,96	0,9152	0,6629	0,7843
		2016	0,82	1,08	1,12	1,01	0,8782	0,6493	0,9322
		2018	0,87	1,05	1,12	0,96	0,8885	0,6986	0,9831
		2020	0,80	1,06	1,16	0,94	0,9256	0,7853	0,8571
39	Spain	2010	1,16	1,16	0,94	1123	0,3231	0,51	0,8286
		2012	1,17	1,04	1,06	1,06	0,9141	0,8225	0,6842
		2014	0,69	0,97	1,17	0,99	0,8802	0,8866	0,6078
		2016	0,60	0,99	1,13	1,04	0,921	0,8134	0,7627
		2018	0,64	1,01	1,00	1,02	0,9366	0,7835	0,9382
		2020	0,74	0,89	0,89	1,01	0,8989	0,8531	0,8452

40	Sweden	2010	2,22	1,93	1,96	1543	0,32	0,7522	0,4857
		2012	2,28	1,93	1,91	1,69	0,8888	0,8782	0,3421
		2014	2,11	1,98	1,68	1,61	0,8562	0,8199	0,3725
		2016	2,15	1,98	1,69	1,56	0,8579	0,798	0,5763
		2018	2,15	1,82	1,70	1,57	0,866	0,8428	0,8427
		2020	2,13	1,80	1,71	1,50	0,9471	0,9625	0,8214
41	Switzerland	2010	2,06	1,75	1,87	1585	0,3088	0,7687	0,2
		2012	2,14	1,81	1,88	1,64	0	0,4135	0,1316
		2014	2,15	1,99	2,11	1,56	0,7198	0,4521	0,2157
		2016	1,98	1,94	2,00	1,53	0,6877	0,4693	0,6102
		2018	2,00	1,92	2,03	1,58	0,6924	0,4859	0,7022
		2020	2,08	1,82	2,01	1,54	0,8946	0,9482	0,9048
42	Ukraine	2010	-1,03	-0,84	-0,82	-84	0,3184	0,2487	0,2571
		2012	-1,12	-0,82	-0,59	-0,28	0,9176	0,3535	0,1579
		2014	-1,02	-0,83	-0,4	-0,14	0,8616	0,3802	0,4314
		2016	-0,85	-0,80	-0,58	0,00	0,839	0,3968	0,7458
		2018	-0,90	-0,74	-0,44	-0,04	0,8436	0,4364	0,6854
		2020	-0,81	-0,69	-0,38	0,09	0,8591	0,5942	0,8095
43	United Kingdom	2010	1,61	1,77	1,62	1,29	0,3149	0,7164	0,7714
		2012	1,67	1,73	1,59	1,34	0,9007	0,8135	0,9211
		2014	1,75	1,87	1,62	1,28	0,8574	0,8534	0,960
		2016	1,89	1,67	1,60	1,30	0,9402	0,8177	0,1
		2018	1,84	1,63	1,39	1,37	0,1	0,8004	0,9831
		2020	1,69	1,49	1,37	1,25	0,9292	0,9195	0,9762
44	Australia	2010	2,02	1,76	1,76	1,42	0,3278	0,6011	0,9143
		2012	1,98	1,76	1,61	1,5	10	0,6543	0,7632
		2014	1,85	1,92	1,6	1,36	0,9978	0,8041	0,9412
		2016	1,81	1,75	1,56	1,35	0,1	0,7646	0,9831
		2018	1,80	1,71	1,59	1,38	0,1	0,7436	0,9831
		2020	1,66	1,64	1,61	1,30	1	0,8825	0,9762
45	Fiji	2010	-0,16	-0,74	-0,92	-1106	0,2839	0,1396	0,0286
		2012	0,18	-0,67	-1,05	-0,98	0,7986	0,2434	0,0789
		2014	0,39	-0,51	-0,4	-0,18	0,8322	0,2872	0,3922
		2016	0,38	-0,06	-0,24	0,03	0,7509	0,3326	0,2881
		2018	0,74	0,21	0,82	0,13	0,7899	0,3562	0,3483
		2020	0,64	0,22	0,55	0,03	0,8227	0,6468	0,4643
46	Kiribati	2010	-0,07	0,06	-0,88	635	0	0,0148	0,0143
		2012	0,02	0,18	-0,8	0,77	0,7871	0	0,0263
		2014	0,29	-0,11	-0,57	0,94	0,6812	0,665	0,2941
		2016	0,26	0,33	-0,40	1,00	0,6599	0,665	0,2542
		2018	0,35	0,61	-0,21	1,11	0,6591	0,773	0,2528
		2020	0,47	1,02	0,04	1,13	0,6778	0,1241	0,5595

47	Marshall Islands	2010	-0,72	0,4	-1,14	1112	0	0,0417	0,0286
		2012	-0,22	0,11	-1,52	1,1	0,759	0,0425	0
		2014	-0,01	-0,2	-1,79	1,15	0,7002	0,448	0,2549
		2016	0,02	-0,03	-1,78	1,19	0,6947	0,849	0,0508
		2018	0,02	0,02	-1,59	0,93	0,7301	0,1037	0,1742
		2020	0,08	0,09	-1,41	1,14	0,7506	0,1247	0,4286
48	Micronesia	2010	-0,26	0,14	-0,47	1,05	0	0,0811	0,0143
		2012	-0,12	0,03	-0,64	0,98	0,8332	0,1013	0,0263
		2014	0,81	-0,24	-0,52	1,11	0,7023	0,1099	0,2549
		2016	0	0	0	0	0,6663	0,1197	0,2203
		2018	0,67	0,07	-0,04	1,11	0,6889	0,1118	0,1404
		2020	0,87	0,21	0,18	1,13	0,6747	0,1061	0,3333
49	Nauru	2010	0,01	0,46	-0,57	1,07	0	0	0,0143
		2012	-0,02	0,73	-0,56	1,1	0,7047	0,17	0
		2014	-0,48	-1,01	-0,57	0,81	0,5617	0,2159	0,0784
		2016	-0,43	-0,78	-0,69	0,51	0,5214	0,2448	0,0847
		2018	-0,56	-0,69	-0,08	0,44	0,5619	0,3033	0,1461
		2020	-0,47	-0,75	-0,08	0,43	0,6006	0,4738	0,2024
50	New Zealand	2010	2,33	1,86	1,81	1,51	0,3278	0,5648	0,7714
		2012	2,31	1,88	1,79	1,62	0,9982	0,7318	10
		2014	2,25	2	1,93	1,52	0,1	0,7506	0,7843
		2016	2,28	1,94	1,84	1,53	0,9402	0,7136	0,9492
		2018	2,17	1,87	1,66	1,59	0,945	0,7455	0,9831
		2020	2,15	1,87	1,58	1,60	0,9516	0,9207	0,9881
51	Palau	2010	-0,5	0,75	-0,85	1,19	0,3165	0,2546	0,0143
		2012	-0,43	0,9	-0,56	1,21	0,8445	0,2802	0,0263
		2014	-0,48	0,28	-0,57	1,18	0,7999	0,3592	0,2353
		2016	-0,43	0,32	-0,40	1,21	0,8867	0,3684	0,0339
		2018	-0,56	0,30	-0,02	1,11	0,8462	0,3346	0,2528
		2020	-0,47	-0,19	-0,05	1,08	0,8816	0,3745	0,3214
52	Papua New Guinea	2010	-1,04	-0,93	-0,73	-0,03	0,1719	0,0228	0,0143
		2012	-0,94	-0,83	-0,74	-0,06	0,3743	0,0411	0
		2014	-0,91	-0,77	-0,61	0,01	0,3	0,53	0,0000
		2016	-0,92	-0,76	-0,74	0,16	0,324	0,739	0,2034
		2018	-0,86	-0,75	-0,67	0,06	0,4778	0,875	0,2022
		2020	-0,58	-0,70	-0,84	0,03	0,5013	0,1233	0,2143
53	Samoa	2010	0,17	0,68	0	0,43	0,2986	0,0819	0,0143
		2012	0,14	0,74	0,02	0,35	0,8335	0,1927	0
		2014	0,36	0,8	0,58	0,67	0,7499	0,2672	0,3922
		2016	0,34	0,90	0,67	0,77	0,7076	0,1576	0,3051
		2018	0,67	0,95	0,67	0,77	0,7241	0,2064	0,264
		2020	0,74	1,02	0,65	0,82	0,7414	0,2596	0,25

54	Solomon Islands	2010	-0,34	-0,65	-1,02	0,07	0,2232	0,019	0,0143
		2012	-0,36	-0,53	-0,81	-0,03	0,5743	0,0198	0,0263
		2014	-0,27	-0,49	-1,12	0,23	0,4702	0,1008	0,0784
		2016	-0,34	-0,28	-1,00	0,47	0,4402	0,115	0,2203
		2018	-0,01	-0,18	-1,03	0,52	0,4732	0,1285	0,2135
		2020	0,09	-0,02	-0,83	0,56	0,4985	0,2106	0,3214
55	Tonga	2010	-0,3	0,1	-0,29	0,29	0,304	0,127	0,0143
		2012	-0,3	-0,02	-0,39	0,34	0,8727	0,2069	0,0263
		2014	-0,27	-0,16	-0,01	0,66	0,8304	0,2348	0,3333
		2016	-0,39	0,32	-0,25	0,64	0,8102	0,2302	0,3559
		2018	-0,04	0,44	0,20	0,65	0,8039	0,2951	0,4663
		2020	-0,31	0,51	0,29	0,64	0,8283	0,48	0,369
56	Tuvalu	2010	-0,26	0,99	-0,49	0,72	0	0,1717	0,0143
		2012	-0,35	0,56	-0,69	0,66	0,8228	0,1866	0
		2014	0,03	0,51	-0,97	1,05	0,7022	0,1761	0,1176
		2016	0,06	0,60	-0,95	1,08	0,6651	0,1981	0
		2018	0,07	0,66	-0,66	1,11	0,6422	0,2693	0,2191
		2020	0,50	0,67	-0,54	1,18	0,6821	0,2807	0,3571
57	Vanuatu	2010	0,3	0,26	-0,27	0,5	0,2354	0,0376	0,0143
		2012	0,34	0,34	-0,19	0,4	0,6531	0,1783	0,0526
		2014	0,48	0,23	-0,52	0,59	0,5736	0,1188	0,1765
		2016	-0,10	0,44	-0,91	0,66	0,5884	0,1684	0,2034
		2018	-0,16	0,42	-0,47	0,60	0,5675	0,192	0,4382
		2020	-0,15	0,32	-0,40	0,61	0,6012	0,3845	0,3929

Lampiran 3 : Hasil Regresi Data Panel dengan Metode Common Effect Model (CEM)

```
Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Assumption: Normal error terms
Variable: Fitted values of y

H0: Constant variance

    chi2(1) = 321.16
Prob > chi2 = 0.0000
```

```
. reg y x1 x2 x3 x4 x5 x6
```

Source	SS	df	MS		
Model	22.8735985	6	3.81226642	Number of obs	= 342
Residual	187.857627	335	.560769035	F(6, 335)	= 6.80
				Prob > F	= 0.0000
Total	210.731225	341	.617980133	R-squared	= 0.1085
				Adj R-squared	= 0.0926
				Root MSE	= .74885

y	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
x1	.1278747	.1099969	1.16	0.246	-.088497	.3442463
x2	-.1348961	.1330483	-1.01	0.311	-.3966114	.1268193
x3	.2549769	.1052795	2.42	0.016	.0478848	.4620691
x4	-.0002232	.0001163	-1.92	0.056	-.000452	5.54e-06
x5	.0578478	.0761011	0.76	0.448	-.0918484	.2075441
x6	-.0020533	.0770577	-0.03	0.979	-.1536313	.1495247
_cons	.412946	.0849803	4.86	0.000	.2457838	.5801082

Lampiran 4 : Hasil Uji Chow

```
. xtreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       342
Group variable: negara                          Number of groups   =        57

R-squared:                                      Obs per group:
     Within  = 0.0214                                         min =         6
     Between = 0.3487                                         avg =       6.0
     Overall = 0.1059                                         max =         6

                                                F(6,279)           =      1.02
corr(u_i, Xb) = -0.2054                         Prob > F           =    0.4139
```

y	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
x1	.1525145	.1963726	0.78	0.438	-.2340456	.5390746
x2	-.0846288	.2506649	-0.34	0.736	-.5780634	.4088057
x3	.2670948	.2459556	1.09	0.278	-.2170696	.7512593
x4	-.0002059	.0001191	-1.73	0.085	-.0004403	.0000285
x5	.0412645	.0802561	0.51	0.608	-.1167199	.1992489
x6	-.003294	.0846806	-0.04	0.969	-.169988	.1634
_cons	.3663636	.2155384	1.70	0.090	-.0579244	.7906517
sigma_u	.33400571					
sigma_e	.73936589					
rho	.16948667	(fraction of variance due to u_i)				

```
F test that all u_i=0: F(56, 279) = 1.15                     Prob > F = 0.2270

.
```

Lampiran 5 : Hasil Uji LM

```
.
. xttest0

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

        y[negara,t] = Xb + u[negara] + e[negara,t]

        Estimated results:
                         |       Var      SD = sqrt(Var)
                ---------+------------------------------
                       y |    .6179801        .7861171
                       e |    .5466619        .7393659
                       u |    .0243179        .1559419

        Test: Var(u) = 0
                                  chibar2(01) =      0.54
                               Prob > chibar2 =    0.2315
```

Lampiran 6 : Data Analisis Deskriptif

```
summarize negara x1 x2 x3 x4 x5 x6 y
```

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
negara	342	29	16.47606	1	57
x1	342	.6237134	.9913082	-1.12	3
x2	342	.7054094	.8833303	-1.07	2.12
x3	342	.5837719	.9550493	-1.79	2.22
x4	342	102.3722	374.186	-1555	1595
x5	342	.7453029	.559765	0	10
x6	342	.5918161	.5662874	0	10
y	342	.5654409	.7861171	0	10

```
summarize negara x1 x2 x3 x4 x5 x6 y
```

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
negara	342	29	16.47606	1	57
x1	342	.6237134	.9913082	-1.12	3
x2	342	.7054094	.8833303	-1.07	2.12
x3	342	.5837719	.9550493	-1.79	2.22
x4	342	102.3722	374.186	-1555	1595
x5	342	.7453029	.559765	0	10
x6	342	.5918161	.5662874	0	10
y	342	.5654409	.7861171	0	10